



LAPORAN KINERJA
Pemerintah Provinsi Jambi
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2022 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu 'Jambi MANTAP, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

LKjIP Tahun 2022 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja mencapai **103,74%** walaupun masih dalam masa pasca pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Provinsi Jambi di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassamulaikum wr. wb.

Jambi, Maret 2023

GUVERNUR JAMBI.

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M. T. Haryono No. 02 Telokagung Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 13 Maret 2023

INSPEKTUR,


H. AGUS HERIANTO, SH, O. GIA
Pembina Utama Madya
NIP. 15090618 199703 1 004

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Diagram	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
I Latar Belakang	1
II Maksud dan Tujuan	2
III Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Kondisi Geografis Daerah	3
3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi	3
3.1.2. Potensi Wilayah	4
3.2. Luas dan Batas Wilayah	5
3.2.1. Aspek Demografi	6
3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	6
3.4. Data Kepegawaian	7
IV Permasalahan dan Isu Strategis	8
4.1. Permasalahan Pembangunan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
BAB IV Penutup	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi	3
Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak	4
Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)	11
Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi	16
Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	23
Gambar 3.2. Capaian pada masing-masing area reformasi birokrasi	24
Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	39
Gambar 3.4. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022	71
Gambar 3.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022	72
Gambar 3.6. IPM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2022	25
Grafik 3.2. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah	29
Grafik 3.3. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2020-2021	29
Grafik 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021–September 2022	42
Grafik 3.4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2011-Maret 2021	44
Grafik 3.5. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi	59
Grafik 3.6. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022	62
Grafik 3.7. Perbandingan Target IKAL PK dengan RPJMD	63
Grafik 3.8. Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	65
Grafik 3.9. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	68
Grafik 3.10. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal	68
Grafik 3.11. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 – 2022	68
Grafik 3.12. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2022	73
Grafik 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2022	73
Grafik 3.13. Ketersediaan Protein	77
Grafik 3.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2013-2022	92
Grafik 3.15. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi, 2013-2022	93
Grafik 3.16. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi, 2013-2022	94
Grafik 3.17. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2013-2022 (Rp 000)	95
Grafik 3.18. Perkembangan IDG	98
Grafik 3.19. Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	99

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Capaian Nilai SAKIP per komponen	29
Diagram 3.2. Nilai Rata-Rata IKM Perangkat Daerah Tahun 2022	32
Diagram 3.3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)	36
Diagram 3.4. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)	37
Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)	38
Diagram 3.6. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58
Diagram 3.7. Skor PPH Tahun 2022	79
Diagram 3.8. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr	79
Diagram 3.9. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur	100
Diagram 3.10. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	100
Diagram 3.11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja, Provinsi Jambi, 2021	101
Diagram 3.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Provinsi Jambi, 2022	102
Diagram 3.13. Perkembangan Indeks Distribusi Pendapatan tahun 2022	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022	18
Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022	19
Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja	21
Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.3. Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Tahun 2022	24
Tabel 3.4. Capaian Hasil Antara	25
Tabel 3.5. Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2022	26
Tabel 3.6. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2022	33
Tabel 3.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Daerah, Sept 2021 - Sept 2022	44
Tabel 3.8. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, September 2022	45
Tabel 3.9. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, Maret 2022–September 2022	45
Tabel 3.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2021–September 2022	46
Tabel 3.11. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022	61
Tabel 3.12. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022	61
Tabel 3.13. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022	61
Tabel 3.14. Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)	63
Tabel 3.15. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—Agustus 2022	70
Tabel 3.16. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020-Agustus 2022	72
Tabel 3.17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 - Agustus 2022	74
Tabel 3.18. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2022 ...	75
Tabel 3.19. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022	78
Tabel 3.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Menurut Komponen, 2013-2022	93
Tabel 3.21. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran	104



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi Pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai gambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi Jambi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.



II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022. Adapun tujuan dari penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022, menggambarkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.



III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

3.1. Kondisi Geografis Daerah

3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 KM² dan luas perairan sebesar 3.274,95 KM² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 KM² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 KM² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 KM² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 KM² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 KM² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 KM² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 KM² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 KM² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 KM² (9,29%)
10. Kota Jambi 205,43 KM² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 KM² (0,78%)

3.1.2. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)



Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

3.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km² atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km² dan 5.948 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan
1	Kerinci	3.324,99	18	297
2	Merangin	7.508,23	24	315
3	Sarolangun	5.948,73	10	156
4	Bungo	4.872,30	17	130
5	Tebo	6.205,81	12	112
6	Batanghari	5.936,84	8	124
7	Muaro Jambi	5.321,67	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	Darat: 4.990,05	15	138
		Laut: (166,21)		
9	Tanjung Jabung Timur	Darat: 4.943,30	11	88
		Laut: 4.063,72		
10	Kota Sungai Penuh	103,76	4	69
11	Kota Jambi	172,28	11	62
Luas Daratan		48.989,98		
Luas Lautan		4.445,94		
Total		53.435,92	143	1.762

Sumber : Jambi Dalam Angka 2022, 2022

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 143 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa/kelurahan adalah sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan.

3.2.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Semester I Tahun 2022 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.642.763 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66,5 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.961 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 257 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,38 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 1,86 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,54 persen.

3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah terdiri dari 22 Dinas Daerah, 8 Badan Teknis, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi.

Nomenklatur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas ;
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
 2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
 7. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 8. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
 9. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
- b. Sekretariat DPRD Provinsi
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 4. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi
 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi
 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi

9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 10. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
 11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
 13. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi
 15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
 16. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi
 17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
 20. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
6. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
7. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

3.4. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi per 31 November 2022, pegawai Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 10.208 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-55 tahun yaitu sebanyak 64,18% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,75%.

Kondisi ini bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Provinsi Jambi yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian berikut memaparkan beberapa indikasi permasalahan ini, yaitu :

1. Belum diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masih berlangsung aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas penambangan ilegal.
2. Prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Daya tanggap yang dibutuhkan adalah terkait dengan :
 - a. Tata guna lahan (*land use planning*), yaitu struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya (UUPA No.5 tahun

1960). Pemerintah Provinsi Jambi perlu menanggapi dengan cepat masalah ini dikarenakan basis perekonomian wilayahnya terletak pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan pertambangan) serta masih tingginya konflik lahan. Dikhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku usaha serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

- b. Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yaitu separuh anggaran Pendapatan Daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Penggalan sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. Belum diterapkannya prinsip visi strategis dengan baik, terlihat dari belum dilakukannya penataan lahan dengan cepat sebagaimana yang telah dijelaskan serta masih minimnya upaya membangun iklim investasi yang mendukung penguatan infrastruktur perekonomian, khususnya investasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode manakala Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 ditetapkan.

4.1.2. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020, juga dialami oleh Provinsi lainnya di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di Provinsi Jambi ini juga masih lebih baik dari nasional, demikian pula

indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) masih tetap memperlihatkan tren membaik. Namun demikian jika melihat tren lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi masih berada di bawah nasional, sehingga perlambatan ini juga perlu diintervensi dengan baik.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong Bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.

Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan

kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se- Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2020 di Provinsi Jambi adalah 8,55 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP. Walaupun pada dasarnya angka ini lebih baik dari nasional, namun capaian tersebut tergolong rendah dalam mendorong daya saing sumber daya manusia. Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal.

Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil. Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 70,71 tahun pada 2016 meningkat menjadi 71,16 tahun pada 2020.

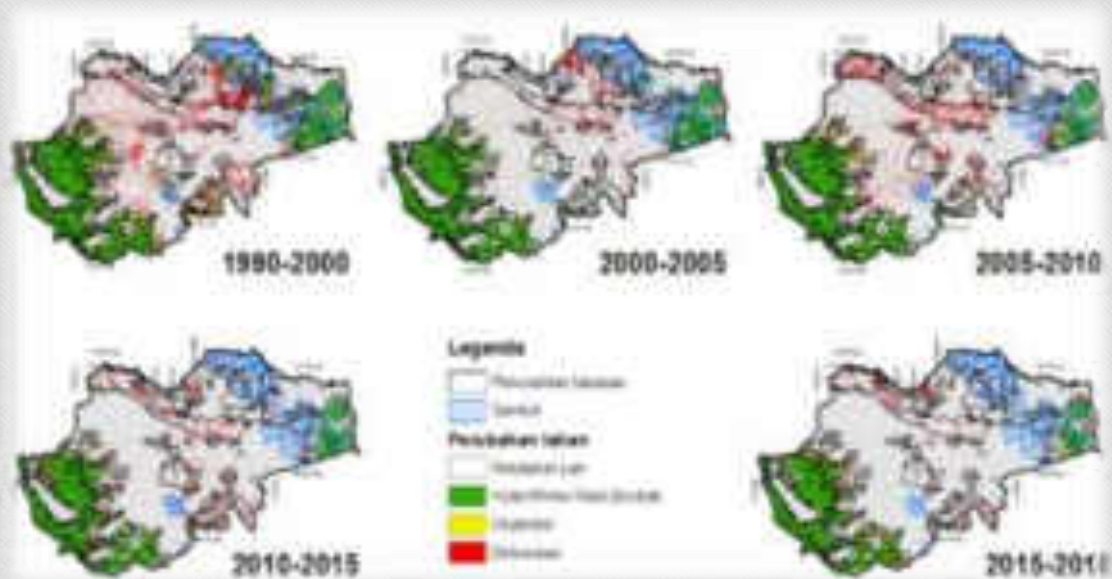
4.1.4. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%. Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO₂e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO₂e (1,75%).

Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GCP, 2019)



Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan. Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,

- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut :

- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;

- b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
- c. Penguatan sektor industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi).

Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya : rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada

kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan.
- b. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya.
- c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan).
- d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung.
- e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian.
- f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital.
- g. Penataan ruang dan tata guna tanah.
- h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan,

angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi - institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada program-program yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama periode Jambi MANTAP yang bermakna perkembangan pembangunan berada di awal visi misi RPJMD baru menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD 2026. Berbagai macam strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran terutama pada pelaksanaan program/kegiatan benar-benar selektif dilakukan. Hal ini didorong oleh adanya pergeseran fokus prioritas pembangunan pada pemulihan kondisi masyarakat akibat pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan dalam isu strategis pada Bab I.

Walau demikian, pergeseran tersebut tidak mengubah visi Provinsi Jambi yang tetap konsisten dalam mewujudkan 'Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT'. Inovasi dan kolaborasi menjadi metode yang esensial dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bahwa diperlukan kreatifitas dan upaya bersama untuk membawa masyarakat Provinsi Jambi dalam melalui dan mengatasi tidak hanya saat pandemi namun juga setelah pandemi.

Secara konsep, Jambi MANTAP memiliki makna :

- | | |
|--------------------------|---|
| Jambi Maju | : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. |
| Jambi Aman | : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Jambi Nyaman | : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja. |
| Jambi Tertib | : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat. |
| Jambi Amanah | : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural. |
| Jambi Profesional | : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab. |

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tiga misi. Lebih rinci berdasarkan urusan sebagai berikut :

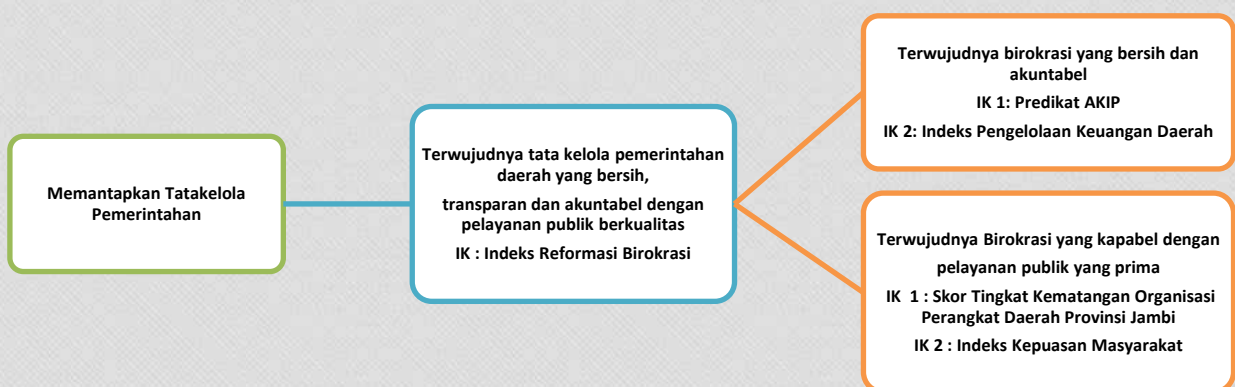
Misi 1 memuat kondisi : **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

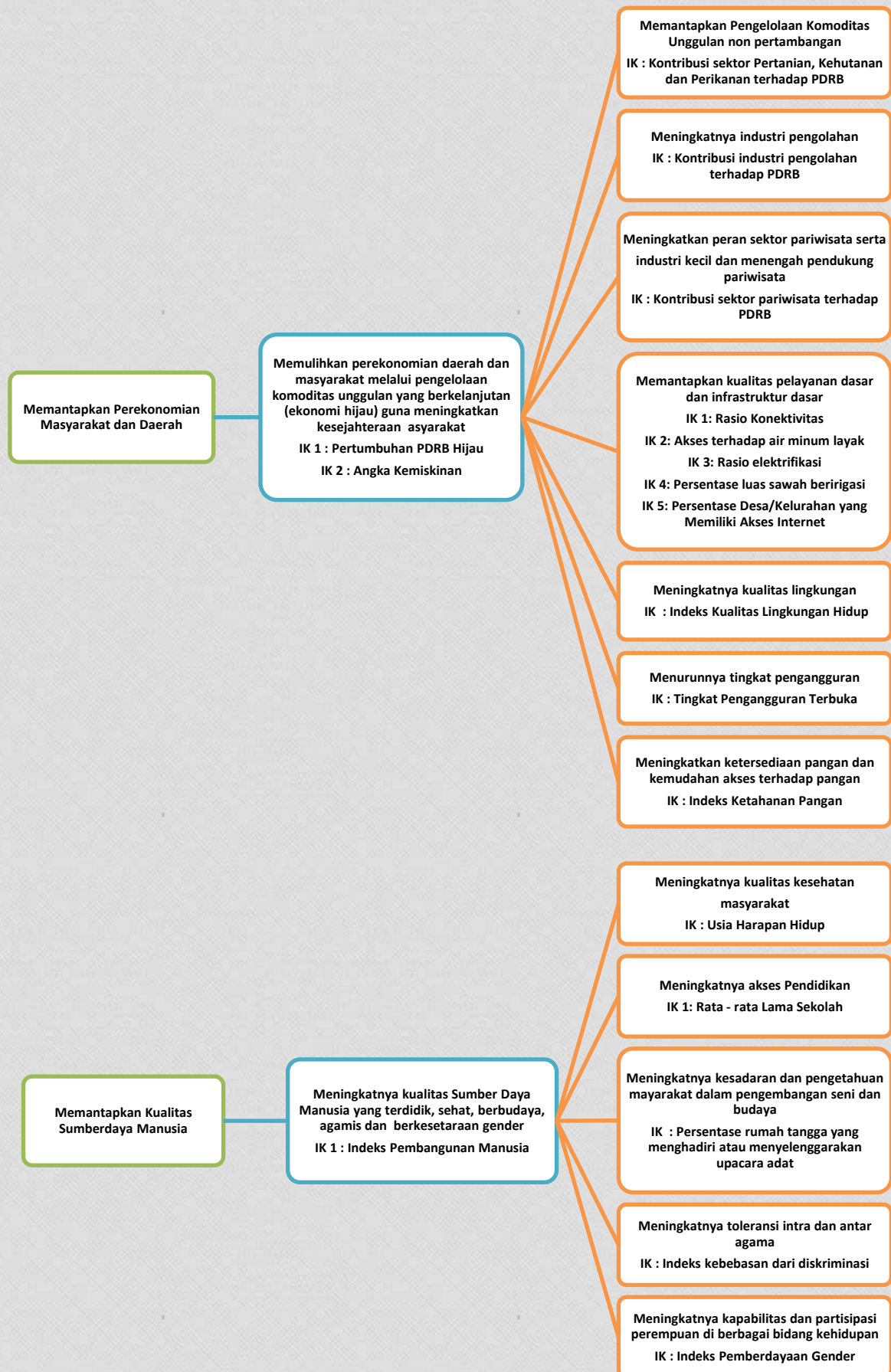
Misi 2 memuat kondisi **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi 3 berkaitan dengan kondisi **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender. Selanjutnya, ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan digambarkan pada logic kinerja utama sebagai kinerja berikut :

Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi





Dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran maka telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus ditetapkan menjadi perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%
		Tingkat Kemiskinan	7,90%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99,36%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,283 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,00%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78

III. Rencana Anggaran Tahun 2022

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RKPD Provinsi Jambi, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2022. Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jambi menunjukkan adanya penambahan pada belanja daerah menjadi Rp. 4.929.035.111.302,74 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Uraian	Rencana (Rp)
1.	Belanja Langsung	1.406.259.144.974,12
2.	Belanja Tidak Langsung	3.398.551.090.972,62
3.	Belanja Tidak Terduga	124.224.875.356,00
Jumlah		4.929.035.111.302,74

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2022



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereview kinerja organisasi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥100	Sangat tinggi	
2.	76 s.d. 90,99	Tinggi	
3.	66 s.d. 75,99	Sedang	
4.	51 s.d. 65,99	Rendah	
5.	s.d. 50,99	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2022.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

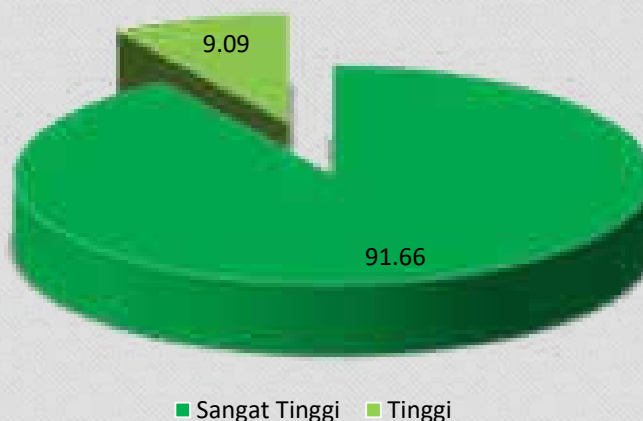
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 memperoleh rata-rata sebesar 91,66%. Sebanyak 11 (sebelas) indikator memperoleh capaian kinerja sangat baik, 1 (satu) indikator mencapai dengan kriteria baik. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%	4,6%	101,09%
		Tingkat Kemiskinan	7,90%	7,70 (Sept 2022)	102,59%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9	68,4	126,90%
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08%	78,86%	99,72%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99,36%	89,50	90,07%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07	70,32	97,57%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,283 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	121,83%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	4,59%	108,93%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,00%	69,50	97,88%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	72,14	100%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78	65,93	97,27%

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2022 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 7 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel di atas, maka 11 indikator atau sebesar 91,66% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator atau sebesar 9,09% dengan capaian tinggi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

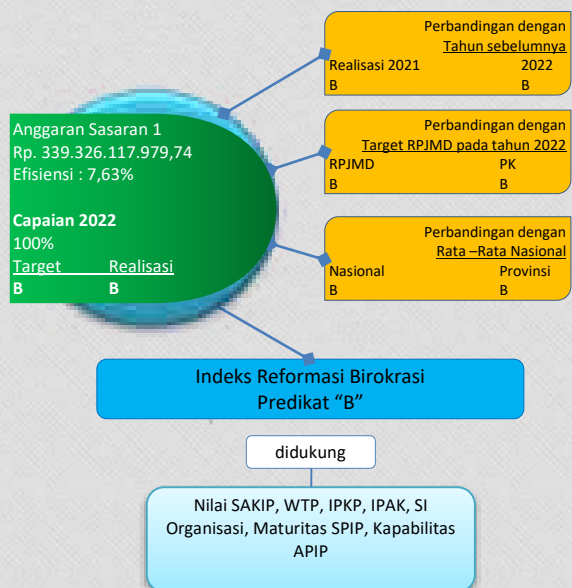
SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas
IK ; INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum.

Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya komponen pengungkit, komponen hasil, hasil “antara” area perubahan, serta komponen “hasil”.

Gambar 3.2. Capaian pada masing-masing area reformasi birokrasi



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand*

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebesar **64,90** dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
Komponen Pengungkit			
Pemenuhan	20,00	12,2	12,38
Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,85	5,72
Reform	30,00	12,87	15,09
Total Komponen pengungkit (A)	60,00	30,92	33,19
Komponen Hasil			
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,36	7,65
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16	9,13
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35	8,24
Kinerja Organisasi	10,00	6,95	6,69
Total komponen hasil (B)	40,00	31,82	31,71
Indeks reformasi birokrasi (A+B)	100,00	62,74	64,90

Sumber: KemenPANRB, 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang

ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.



Hasil antara area perubahan pada Provinsi Jambi, sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Hasil Antara

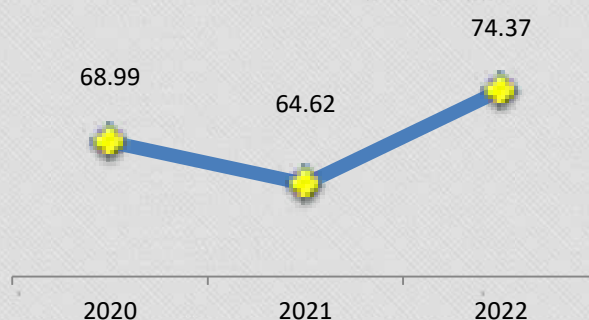
Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
ASN Profesional	0-100	29,80	Badan Kepegawaian Negara
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,19	Kementerian PANRB
Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	85,70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,04	Kementerian PANRB
Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepatuhan Pelayanan	0-100	89,62	Ombudsman Republik Indonesia
Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	74,37	Arsip Nasional Republik Indonesia

Sumber : LHE RB Pemerintah Provinsi Jambi 2022

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 89,62 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia. Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi serta maturitas SPIP berada pada level 3.

Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 74,37.

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2022

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi terutama menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB dengan memperhatikan beberapa catatan penting antara lain :

a. Dalam Manajemen Perubahan :

- Rencana aksi agen perubahan belum konkret dan belum menjelaskan rencana kerja/kegiatan perubahan, hanya berisi kegiatan internalisasi core values ASN berAKHLAK, dan disiplin pegawai
- Belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai

- Rencana aksi kinerja yang disusun oleh Pemda dan PD belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal khususnya dalam pelaksanaan quick wins mandiri
- b. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis antar kebijakan pusat/daerah dengan Perangkat Daerah telah disusun, namun belum terdapat sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan.
- c. Transformasi digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui aplikasi SIAPPO belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat.
- d. Telah memanfaatkan aplikasi dalam pengembangan manajemen SDM diantaranya penilaian SKP secara online, penyederhanaan pengecekan urusan kepegawaian dengan SILACAK, pelautan kenaikan gaji berkala dengan SIABON, namun belum dilakukan
- pemantauan terhadap pemanfaatan aplikasi tersebut oleh pegawai.
- e. Aplikasi e-SAKIP untuk pengukuran capaian kinerja organisasi belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- f. Mitigasi resiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan resiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja
- g. Dalam pelayanan publik :
 - Survei kepuasan masyarakat baru dilakukan sebagian kecil unit kerja, sehingga belum menggambarkan pelayanan publik secara keseluruhan dan strategi perbaikannya
 - Seluruh Perangkat Daerah telah mempunyai website tersendiri dan SIPP (sistem informasi pelayanan publik), namun belum terintegrasi dengan website Pemerintah Daerah

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Jambi memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021 (2022)

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian PANRB
2.	Nilai SAKIP	0-100	66,38	Kementerian PAN RB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,30	Kementerian PAN RB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,43	Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	72,98	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2022 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja

dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi

- nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
 3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;
 5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
 6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
 7. Melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengusulkan kembali pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi;
 8. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;
 9. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
 10. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;
 11. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
 12. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;
 14. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wilayah 1 dalam menyempurnakan komponen SAKIP.

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wil I Bapak Ahmad Hasmy Pada tanggal 6 & 7 Juni Tahun 2022 Bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta



Bimbingan teknis ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah agar senantiasa meningkatkan kualitas implementasi SAKIP yang diantaranya bersama-sama mereviu dan melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya melakukan penjabaran melalui Cascading Kinerja Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

15. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja potensial di lingkungan Provinsi Jambi agar dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB serta meningkatkan keberhasilan unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

16. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, dan pengaduan masyarakat secara baik, yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan
17. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal, serta secara periodik melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2022 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 37,30 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.2. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah



Sumber : Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Sarpras. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2020 mendapat nilai 62,32, pada tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, dan pada tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38. Bila dibandingkan dengan target akhir

periode RPJMD tepatnya pada tahun 2026 adalah A, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **75%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.



Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :

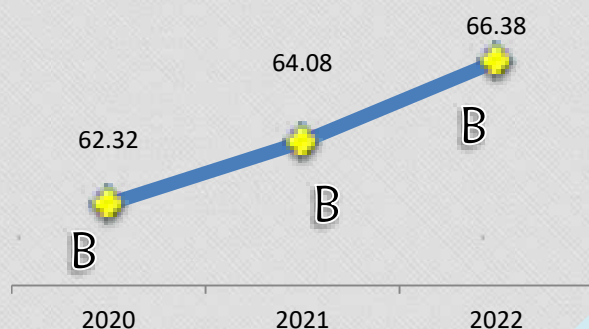
Diagram 3.1. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2022 (2023)

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.3. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2020-2022



Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini



GUBERNUR JAMBI DR. H. AL HARIS, S.KP., M.H. MENERIMA PENGHARGAAN WTP
OLEH BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesembilan kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan

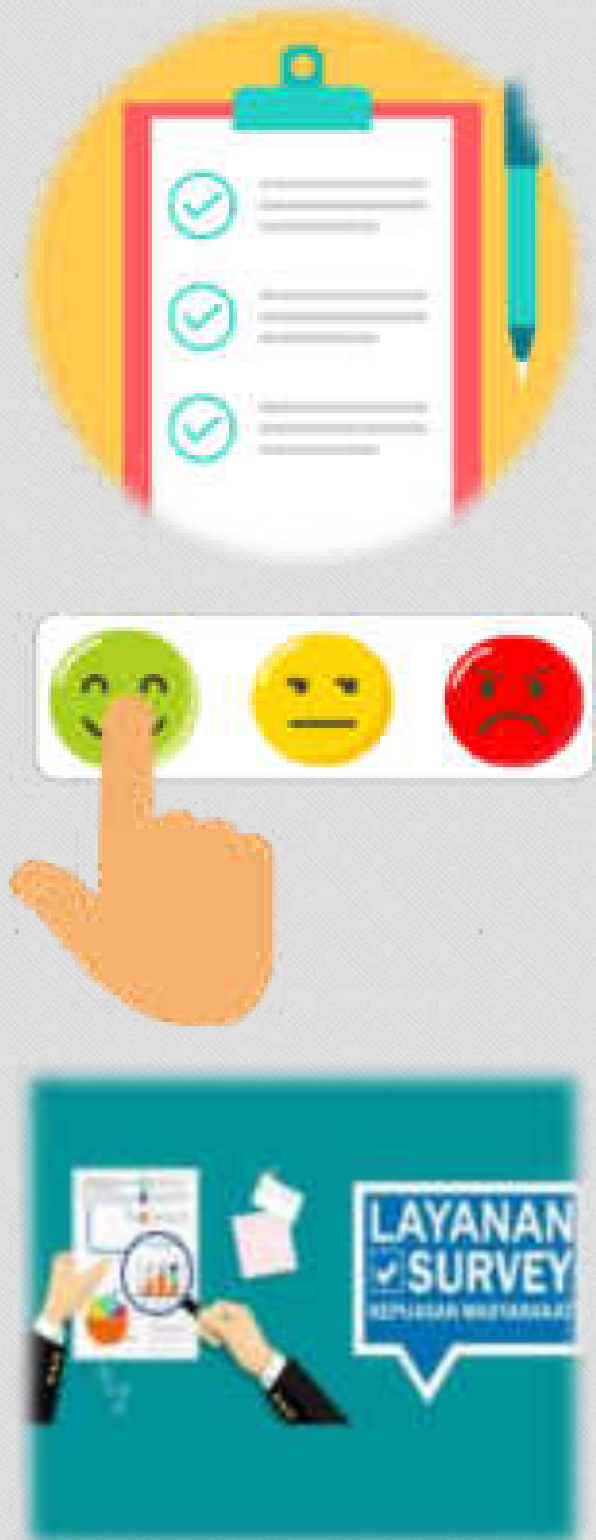
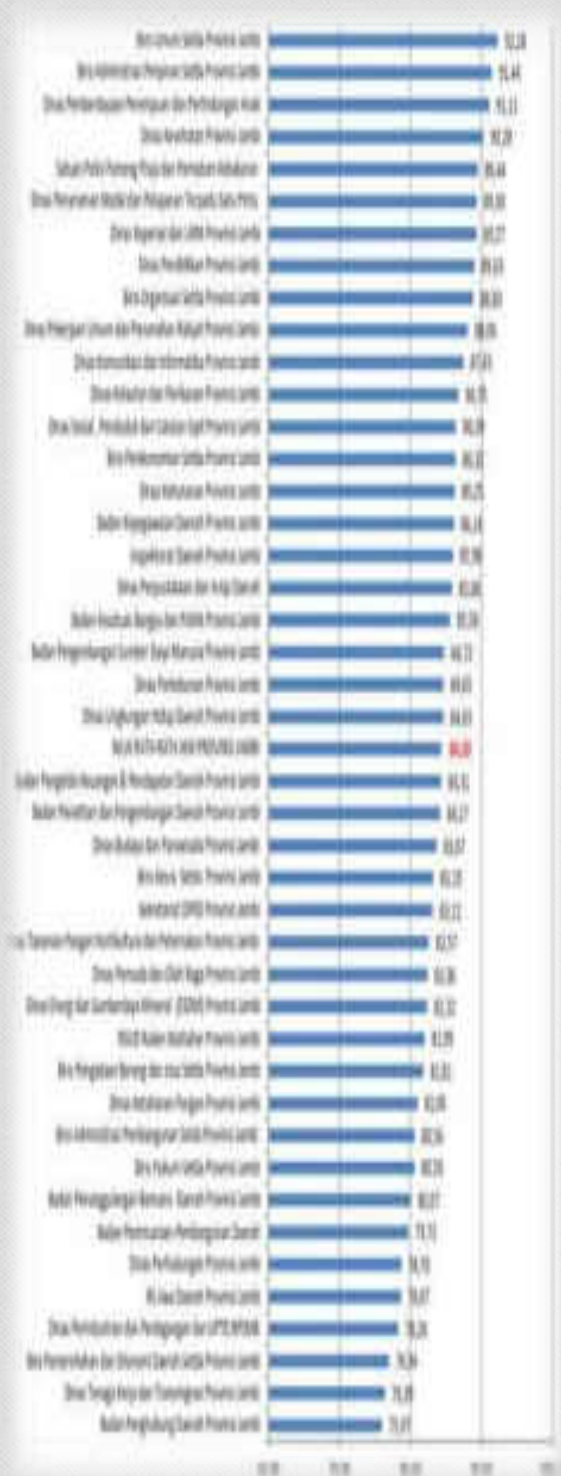
Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2022, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **84,33**.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI, 15 AGUSTUS 2022. MELAKUKAN ANUGERAH PREDIKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 OMBUDSMAN RI

Diagram 3.2. Nilai Rata-Rata IKM Perangkat Daerah Tahun 2022



32

Tabel 3.6. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2022

Unsur Pelayanan	2018	2019	2020	2021	2022
U1: Persyaratan pelayanan	81,713	83,862	84,296	86,290	83,926
U2: Prosedur pelayanan	81,390	82,776	83,877	84,375	83,460
U3: Waktu pelayanan	78,860	81,326	81,741	82,158	81,738
U4: Biaya/tarif pelayanan	82,229	83,006	85,226	85,906	89,653
U5: Produk/hasil pelayanan	79,931	81,742	82,759	83,375	83,654
U6: Kemampuan petugas pelayanan	80,763	82,070	82,665	82,653	83,548
U7: Perilaku petugas pelayanan	81,858	82,480	83,057	83,089	83,707
U8: Maklumat pelayanan	78,916	80,961	81,740	82,073	70,716
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	79,775	80,382	82,451	83,590	88,546
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,604	82,063	83,090	83,723	84,333

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2022

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsur pelayanan disetiap tahunnya. Unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya/tariff pelayanan dan terendah adalah pada unsur maklumat pelayanan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas informasi mengenai maklumat pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan- perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatakerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi dikarenakan keterbatasan sumber daya keuangan.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

SASARAN STRATEGIS 2 :

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

IK : 1. PDRB HIJAU,
2. TINGKAT KEMISKINAN

**INDIKATOR KINERJA :
PDRB HIJAU**

Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan III 2022 menyajikan beberapa indikator Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan yang lugas. Capaian pembangunan di Jambi selama kurun waktu 2013-2022 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun.

PDRB Hijau didapatkan dari nilai PDRB Konvensional, dikurangi nilai deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan hidup.

Penilaian deplesi sumber daya alam didapatkan dari pengurangan cadangan sumber daya alam akibat adanya kegiatan ekonomi manusia. Sedangkan penilaian degradasi lingkungan hidup didapatkan dari penurunan kualitas lingkungan yang ditunjukkan oleh berkurangnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perekonomian Provinsi Jambi 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp276,32 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp76,1 juta atau US\$5.125,1. Ekonomi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,92 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,05 persen.

Ekonomi Jambi triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,19 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,78 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 47,81 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV-2022 BRS No.012/02/15/Th.XVII, 6 Februari 2023 Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 30,25 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 67,97 persen.

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

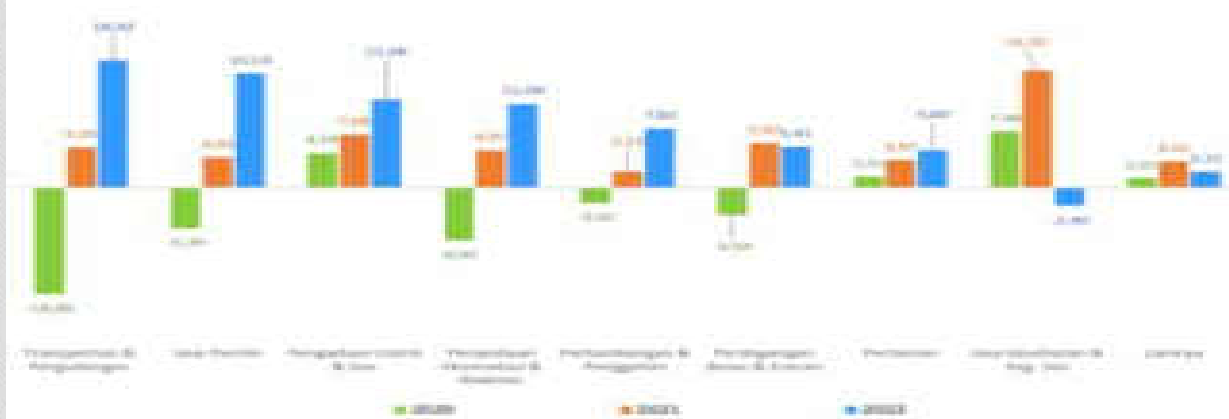
Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,82 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

tumbuh 5,41 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,00 persen. Di samping itu, beberapa lapangan usaha terkontraksi. Jasa kesehatan yang terdalam yaitu sebesar 2,40 persen.



Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,25 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 19,29 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,16 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

Diagram 3.3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN IV-2021 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,19 persen; diikuti Jasa lainnya sebesar 10,41 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,65 persen; Pengadaan Listrik dan Gas 9,62 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,12 persen. Sementara itu terdapat beberapa lapangan usaha pertumbuhannya terkontraksi pada periode ini. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,57 persen dan Konstruksi sebesar 8,17 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN III-2022 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) terkontraksi sebesar 0,38 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Industri Pengolahan sebesar 5,02 persen. Selain itu, Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalan; serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang masing-masing terkontraksi 3,79 persen; 3,76 persen; dan 2,69 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Transportasi dan Pergudangan tumbuh signifikan sebesar 10,07 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,08 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,64; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,64 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 2,89 persen dan 0,54 persen.

PDRB MENURUT PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 6,05 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,46 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,27 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,38 persen; dan PK-P sebesar 1,52 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen.

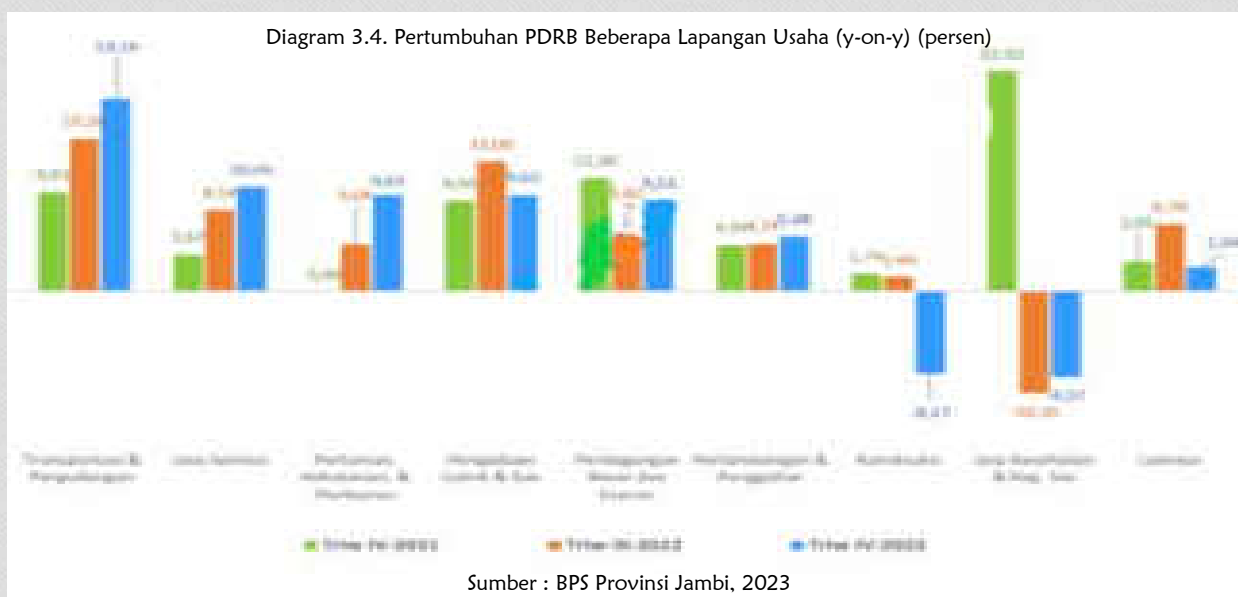
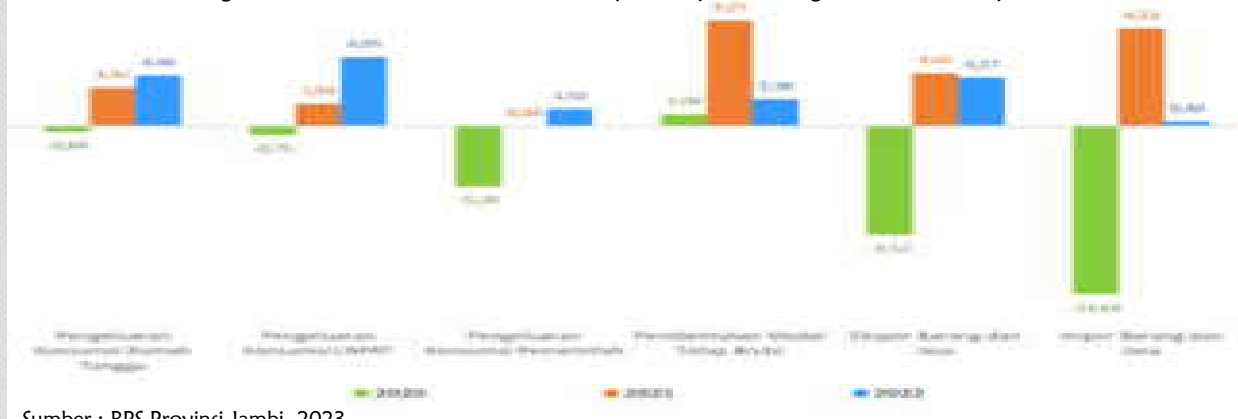


Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)



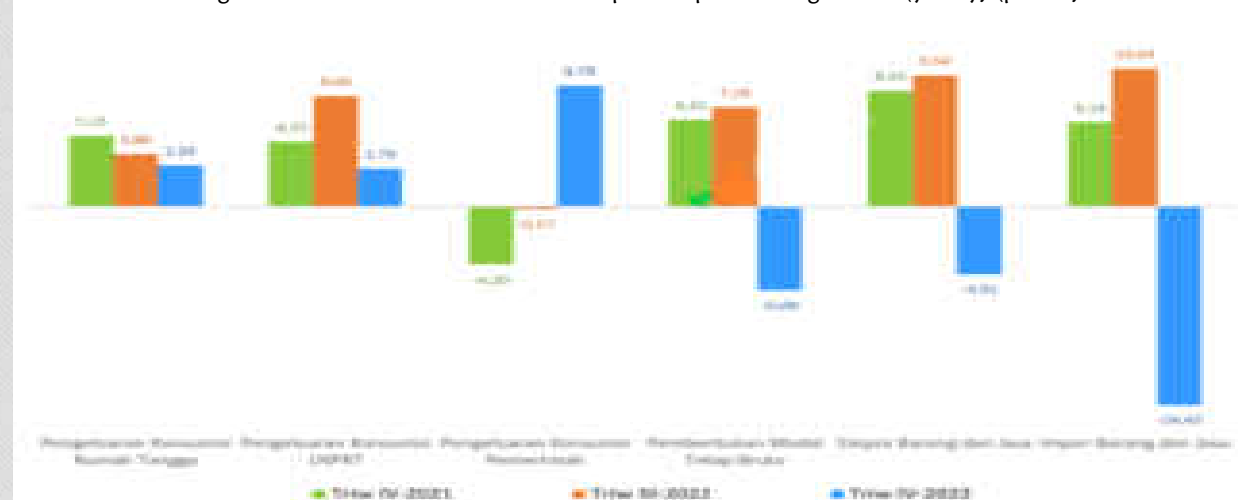
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (67,97 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 41,40 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 20,14 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 6,86 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,77 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 37,67 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN IV-2021 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 8,78 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 2,99 persen; serta PK-LNPRT tumbuh 2,76 persen. Sementara itu, komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa 4,91 persen; PMTB sebesar 6,08 persen, serta Impor Barang dan Jasa sebesar 14,43 persen.

Diagram 3.6. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan III-2022 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,38 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 47,81 persen; berikutnya adalah Komponen PK-RT sebesar 4,53 persen; Komponen PMTB sebesar 1,51 persen; dan Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 0,82 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan 15,44 persen, dan Komponen PK-LNPRT terkontraksi sebesar 0,45 persen. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (q-to-q) secara umum mengalami kontraksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pasca pandemi COVID-19, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan (c-to-c) tertinggi, yaitu sebesar 5,23 persen, diikuti Provinsi Jambi sebesar 5,13 persen serta Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,09 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen.

Gambar 6 menampilkan Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen) 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV-2022. Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2022 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 23,50 persen, Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 22,63 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 14,02 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,55 persen.

Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.
5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan.
8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan

Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Deplesi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Deplesi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsic terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.543,1	70.202,4	80.170,4	44.342,9	44.289,2	43.247,9
2. Pertambangan dan Penggalian	22.287,2	22.480,2	22.234,1	24.089,2	25.122,2	26.220,2
3. Industri Pengolahan	22.099,27	24.748,2	24.798,7	22.252,7	25.773,2	24.790,7
4. Perdagangan Eceran dan Kafe	924,2	945,2	975,2	85,2	86,2	91,2
5. Perdagangan Besar, Perdagangan Komplek, Lumbung dan Grosir Lain-lain	10,2	20,2	25,2	20,2	22,2	25,2
6. Akomodasi	14.434,4	16.202,4	17.202,4	13.546,4	14.202,4	14.202,4
7. Pengangkutan, Sewa dan Penyewaan, Reparat, Akomodasi dan Kegiatan Lain-lain	24.471,4	26.202,2	26.202,2	24.422,2	25.244,2	25.244,2
8. Transportasi dan Pergudangan	5.422,4	6.202,4	7.202,2	4.202,4	4.202,4	5.202,2
9. Informasi dan Komunikasi	2.422,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
10. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.202,2	5.202,2	6.202,2	4.202,2	5.202,2	6.202,2
11. Real Estate	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
12. Jasa Kesehatan	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
13. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan Sosial Lainnya	4.202,2	4.202,2	4.202,2	4.202,2	4.202,2	4.202,2
14. Jasa Pendidikan	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
15. Jasa Rekreasi dan Kegiatan Budaya	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
16. Jasa Lainnya	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2	2.202,2
Total (A+B+C+D+E+F+G)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2021/2020 (%)		Laju Pertumbuhan 2022/2021 (%)		Laju Pertumbuhan 2022/2020 (%)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,79	15,99	14,49	14,49	14,49	14,49
2. Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,79	-0,79	0,89	0,89	0,89
3. Industri Pengolahan	1,25	1,05	-0,24	1,25	1,25	1,25
4. Perdagangan Eceran dan Kafe	2,20	2,20	3,20	2,20	2,20	2,20
5. Perdagangan Besar, Perdagangan Komplek, Lumbung dan Grosir Lain-lain	0,20	0,20	-0,20	0,20	0,20	0,20
6. Akomodasi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
7. Pengangkutan, Sewa dan Penyewaan, Reparat, Akomodasi dan Kegiatan Lain-lain	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8. Transportasi dan Pergudangan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
9. Informasi dan Komunikasi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
10. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
11. Real Estate	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
12. Jasa Kesehatan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
13. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan Sosial Lainnya	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
14. Jasa Pendidikan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
15. Jasa Rekreasi dan Kegiatan Budaya	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
16. Jasa Lainnya	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Total (A+B+C+D+E+F+G)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan,Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
26. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,Dan Usaha Mikro (UMKM)
28. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
29. Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN



Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,70 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September sebesar 283,82 ribu orang, meningkat 4,45 ribu orang terhadap Maret 2022 dan 3,96 ribu orang terhadap September 2021.

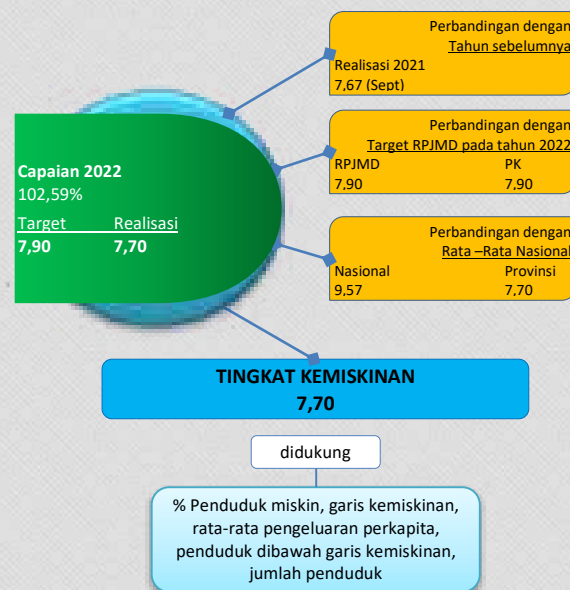
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 10,51 persen, turun menjadi 10,48 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 6,19 persen, naik menjadi 6,32 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 460 orang (dari 127,34 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 127,80 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 4 ribu orang (dari 152,03 orang pada Maret 2022 menjadi 156,03 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp585.950,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.292,- (75,65 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.658,- (24,35 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,76 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan Perkembangan Indeks

Harga Konsumen November 2022 per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.789.122,-/rumah tangga miskin/bulan.



Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).

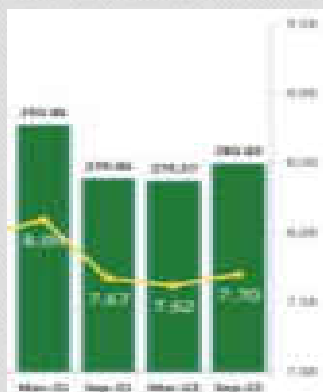
Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2012–September 2022

Secara umum, pada periode Maret 2012–September 2022, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami kenaikan dari sisi jumlah maupun persentase, pada Maret–September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada September 2020 dan Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret–September 2015 dipicu oleh dampak kebakaran hutan. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada September 2022 kembali naik sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022 disajikan pada Gambar berikut ini :

Grafik 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021–September 2022



BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2021–September 2022

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada September 2022 mencapai 283,82 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 4,45 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3,96 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 7,70 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2021.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen November 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 460 orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 4 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,51 persen menjadi 10,48 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 6,19 persen menjadi 6,32 persen.

Tabel 3.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021–September 2022

Daerah	Periode	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	Maret 2021	10,51	10,51
	September 2021	10,51	10,51
	September 2022	10,48	10,48
Perdesaan	Maret 2021	6,19	6,19
	September 2021	6,19	6,19
	September 2022	6,32	6,32
Total	Maret 2021	7,70	7,70
	September 2021	7,70	7,70
	September 2022	7,70	7,70

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera pada bulan September 2022 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada September 2022. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 14,75 persen,

14,34 persen, 11,95 persen, dan 11,44 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 4,61 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Bangka Belitung.

Tabel 3.8. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, September 2022

Topic	Revenue (Million USD)				Profit (Million USD)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
Ad	10.5	12.0	11.8	13.2	3.0	3.5	3.2	
Customer Care	8.0	7.5	8.2	9.0	1.5	1.2	1.8	
Marketing	15.0	16.5	15.5	17.0	4.0	4.5	4.2	
R&D	6.0	7.0	6.5	7.5	2.0	2.5	2.2	
Sales	20.0	22.0	21.0	23.0	5.0	5.5	5.2	
Support Center	12.0	11.0	11.5	12.5	3.0	2.8	3.5	
Training	9.0	9.5	9.2	10.0	2.5	2.8	2.6	
Website	18.0	19.0	18.5	20.0	4.5	5.0	4.8	
Mobile App	11.0	12.0	11.5	12.5	3.0	3.5	3.2	
Hardware Dev.	7.0	8.0	7.5	8.5	2.0	2.5	2.2	
Partnership	13.0	14.0	13.5	14.5	3.5	4.0	3.8	

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2021–September 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp585.950,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,34 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 13,18 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK September 2022 sebesar 75,65 persen.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar di perdesaan yakni sebesar 20,21 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 15,40 persen. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar di perkotaan yaitu sebesar 11,85 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 15,90 persen.

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (7,15 persen di perkotaan dan 4,28 persen di perdesaan), cabe merah (4,93 persen di perkotaan dan 5,17 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,33 persen di perkotaan dan 2,91 persen di perdesaan), mie instan (2,76 persen di perkotaan dan 1,99 persen di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instant (2,31 persen di perkotaan dan 1,32 persen di perdesaan), bawang merah (2,30 persen di perkotaan dan 2,52 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2022

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp2.789,122-/bulan naik sebesar 7,57 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.592.883,-/bulan.

Tabel 3.9. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga
Miskin, Maret 2022–September 2022

Time	Cost Accounting per Month (\$) (\$100,000)	Variable Support Cost (\$100,000)	Cost Accounting per Month (\$) (\$100,000)
Q	Q	Q	Q
Month 2012	191,075	9.75	1,910,000
September 2012	190,000	9.75	2,000,000
Percentage	1.04	9.25	1.07
Month 2012 - September 2012 (10)			

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan September 2021–September 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022– September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,193, naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,174. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,260 menjadi 0,237.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,739, sedangkan di perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,923. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,393, sedangkan di perdesaan lebih

rendah, yaitu mencapai 0,160.

Tabel 3.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2021–September 2022

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Rata-rata
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2021	1,181	0,929	1,086
Maret 2022	1,174	0,908	1,074
September 2022	1,739	0,923	1,331
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2021	0,260	0,164	0,212
Maret 2022	0,251	0,167	0,209
September 2022	0,393	0,160	0,277

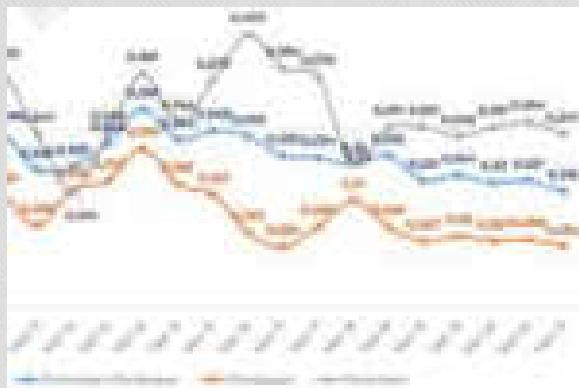
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

GINI RATIO

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Jambi pada Maret 2011 tercatat sebesar 0,340, kemudian turun pada September 2013 menjadi 0,327 dan naik terus hingga Maret 2015 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,361. Pada September 2015 Gini Ratio kembali turun menjadi 0,344, dan sejak maret 2017 sampai September 2018 cenderung stagnan di 0,334 - 0,335. Selanjutnya mulai September 2019 mengalami penurunan hingga September 2020, dan naik kembali pada Maret 2021.



Grafik 3.4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2011-Maret 2021.



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar peangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SASARAN STRATEGIS 3 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

INDIKATOR KINERJA : RASIO KONEKTIVITAS

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan system yang sudah terbangun.

Berikut digambarkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022.



Rasio Konektivitas Provinsi Jambi mencapai angka 52,69%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 53,9 maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 97,76% masuk dalam kategori tinggi.

Terwujudnya konektivitas nasional, regional, dan lokal merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Rasio konektivitas diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Rasio konektivitas pelayanan angkutan = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

$$IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{(\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$$

$$= \frac{(22 \times 1,8)}{34}$$

$$= 0,71$$

$$IK1 (\text{ASDP}) = \frac{(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas})}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}}$$

$$= \frac{(2 \times 0,8)}{3}$$

$$= 0,53$$

Maka :

$$\text{Rasio konektivitas pelayanan angkutan} = (0,71 \times 70) + (0,53 \times 30)$$

$$= 52,5 + 15,9$$

$$= 68,4$$

Bobot angkutan jalan atau ASDP : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{68,4}{53,9} \times 100\%$$

$$= 126,9\%$$

Sasaran dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan regional.

Rasio konektivitas turut didukung oleh pentingnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran atas indikator kinerja Kinerja lalu lintas dilakukan dengan cara membandingkan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Adapun hasil pengukuran kinerja lalu lintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :

$$VC \text{ Rasio di Jalan Provinsi} = \frac{(VC \text{ mobil sedan/lori} + VC \text{ mobil lain/kota})}{2}$$

$$= \frac{0,66 + 0,45}{2}$$

$$= 0,55$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator Kinerja Lalu Lintas dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi

Kendaraan Bermotor Provinsi

4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan



pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.

3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indikator konektivitas tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peng mawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- b. Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- c. Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan

Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.



Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2022 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2022 adalah sebesar 77,36%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 79,60%, maka persentase capaian ini mencapai 97,18% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2022 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.



Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)



INDIKATOR KINERJA : AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan.



Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan.

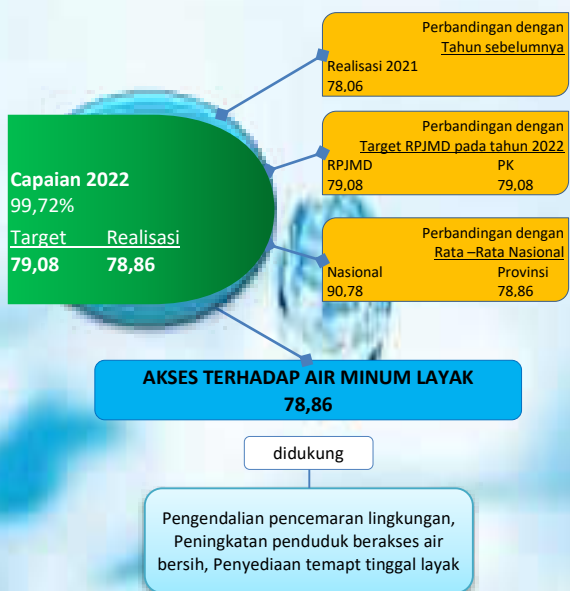
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



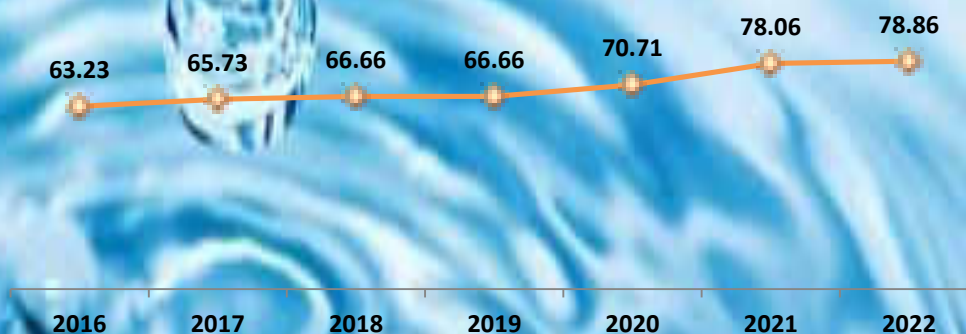
Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2022 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Pada tahun 2022, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 78,86 persen. Capaian ini sangat tipis dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 79,08 persen serta terealisasi sebesar 97,18% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah

sebesar 78,86%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 yakni sebesar 79,08% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2022 mencapai 99,72% dan termasuk dalam kategori tinggi.



Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2022

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi



Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.

Pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

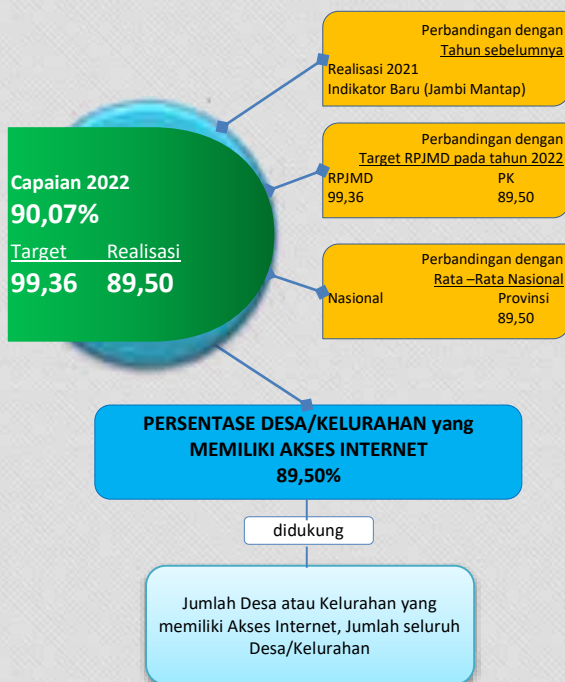
Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dengan menggunakan APBD 2022 sebesar Rp 4.835.160.000.



Pemerintah Provinsi Jambi memastikan dari 285 Desa, 121 Desa diantaranya sudah terkoneksi jaringan internet yaitu, di Kabupaten Muaro Jambi 5 Desa, Tanjab Timur (Tanjabtim) 9 Desa 7 sudah terkoneksi dan 2 desa dalam tahap pengerjaan.

Kemudian di Tanjabbar ada 22 Desa sudah konek, Kerinci 17 + 1 Sungai Penuh sudah 5 desa, dan Sarolangun ada 6 Desa, 1 diantaranya sudah konek, juga di Batanghari ada 10 Desa, 5 sudah terkoneksi, artinya masih ada 164 Desa Blankspot lagi tersisa dan akan diselesaikan pada tahap selanjutnya yaitu di tahun 2023.



Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.

Berikut disampaikan nama Kab/Kota dan Desa yang mendapat akses internet sebagai berikut :

Kabupaten Tanjab Barat di Kecamatan Betara- Desa Bunga Tanjung- Desa Pematang Buluh, Kecamatan Bram Itam- Desa Mekar Tanjung- Desa Jati Mas- Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Kuala Betara-Desa Sungai Dualap-Desa Sungai Gebar- Desa Tanjung Pasir- Desa Sungai Dungun

Kecamatan Muara Papalik- Desa Dusun Mudo, Kecamatan Pengabuan- Desa Parit pudin- Desa Parit Bilal- Desa Sungai Serindit- Desa Sungai Baung- Desa Pasar Senin, Kecamatan Senyerang- Desa Kempas Jaya- Desa Lumahana, Kecamatan Seberang Kota- Desa Teluk Pulau Raya- Desa Kuala Kahar- Desa Mekar Alam- Desa Kuala Baru. Kecamatan Tebing Tinggi - Desa Delima

Kabupaten Tanjab Timur, Kecamatan Geragai- Desa Pandan Jaya, Kecamatan Ratau Rasau- Desa Sungai Dungun- Desa Marga Mulya-Desa Tri Mulya, Kecamatan Muara Sabak Barat- Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Dendang-Desa Kuala Dendang, Kecamatan Kuala Jambi-Desa Manunggal Makmur. Kecamatan Sadu- Desa Labuhan Pering- Desa Sungai Cemara.

Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpeh- Desa Sogo- Desa Rantau Panjang- Desa Londreng- Desa Rondang, Kecamatan Taman Rajo- Desa Manis Mato.

Kabupaten Batanghari, Kecamatan Pemayung- Desa Kuap- Desa Kaos Kecamatan Maro Sebo Ulu- Desa Rawa Mekar- Desa Mekar Sari, Kecamatan Mersam- Desa Belanti Jaya, Kecamatan Batin XXIV- Desa Jangga Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir- Desa Karya Mukti, Kecamatan Bajubang- Desa Sungkai, Kecamatan Muara Bulian- Desa Olak- Desa Rambahan.

Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Batang Asai- Desa Batu Empang- Desa Bukit Berantai, Kecamatan Pauh- Desa Seko Besar, Kecamatan Mandiangin- Desa Rangking Dalam- Desa Jernang Baru, Kecamatan Limun- Desa Napal Melintang-Desa Cermin Nan Gedang- Desa Tambang Tinggi.

Kabupaten Merangin, Kecamatan Sungai Manau- Desa Sungai Pinang- Desa Tiangko, Kecamatan Pangkalan Jambu- Desa Baru

Pangkalan Jambu- Desa Birun -Desa Bukit Perentak. Kecamatan Pememenang Selatan- Desa Selango -Desa Batang Kibul- Desa Sungai Tabir- Desa Telentang- Desa Air Liki- Desa Muaro Langeh- Desa Ngaol Ilir- Desa Air Liki Baru.

Kecamatan Muaro Siau- Desa Durian Rumbun- Desa Lubuk Birah- Desa Pulau Raman- Desa Sepantai Renah. Kecamatan Tiang Pumpung- Desa Rantau Limau Manis. Kecamatan Lembah Masurai- Desa Muara Pangsi- Desa Rantau Jering, Kecamatan Jangkat- Desa Lubuk Mentilin- Desa Rantau Kermas- Desa Renah Kemumu. Kecamatan Jangkat Timur- Desa Beringin Tinggi- Desa Pematang Pauh.

Kabupaten Bungo Kecamatan Rantau Pandan- Desa Leban, Kecamatan Pelepat- Desa Sekampil- Desa Bukit Telago, Kecamatan Lubuk Mengkuang- Desa Tuo Lubuk Mengkuang- Desa Baru Lubuk Mengkuang- Desa Pauh Agung- Desa Pemunyan- Desa Rantau Tipu.

Kecamatan Bathin III Ulu- Desa Aur Cino- Desa Sungai Telang- Desa Kerak Apung- Desa Timbolasi, Kecamatan Bathin II Pelayang Desa Pulau Kerakap.

Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah/Muaro Tebo- Desa Tengah Ulu- Desa Semabu, Kecamatan Tebo Ulu/Pulau Temiang- Desa Teluk Kualo Desa Rantau Langkap, Kecamatan Rimbo Bujang/Wirotho Agung- Desa Tirta Kencana. Kecamatan Sumay/Teluk Sengkawang- Desa Pemayungan- Desa Muara Sekalo.

Kecamatan Rimbo Ilir/Karang Dadi- Desa Sari Mulya- Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ulu/Suka Damai- Desa Sungai Pandan, Kecamatan Muara Tabir/Pintas Tuo- Desa Pintas Tuo- Desa Olak Kemang. Kecamatan Serumpun/Seukutur Jaya- Desa Pagar Puding Lama.

Kabupaten Kerinci, Kecamatan Batang Merangin- Desa Muara Emat, Kecamatan Gunung Raya- Desa Masgo, Kecamatan Bukit Kerman- Desa Karang Pandan Kecamatan Air Hangat Timur- Desa Pungut Hilir, Kecamatan Depati Tujuh- Desa Belui Tinggi, Kecamatan Siulak- Desa Air Terjun- Komplek Perkantoran

Bukit Kecamatan Siulak Mukai- Desa Lubuk Tabun

Kecamatan Gunung Kerinci- Desa Sungai Batu Gantih- Desa Simpang Tutup- Desa Ujung Ladang- Desa Danau Tinggi- Desa Suko Pangkat- Desa Sungai Gelampek, Kecamatan Kayu Aro Barat, Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro- Desa Renah Kasah, Kecamatan Gunung Tujuh- Desa Pauh Tinggi, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Kumun Dabai- Desa Renah Kayu Embun.

Capaian realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 89,50, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 99,36% maka capaian kinerja pada indikator ini memperoleh persentase sebesar 90,07%.

Belum optimalnya capaian kinerja ini semata-mata terkait dengan keterbatasan anggaran dalam perencanaan pada tahun 2022 sehingga dari 285 desa/kelurahan yang belum memiliki akses internet atau blankspot sudah terpasang sebanyak 121 fasilitas internet gratis, artinya masih tersisa 164 desa/kelurahan yang akan dilanjutkan guna mendapatkan akses internet gratis pada tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.



Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

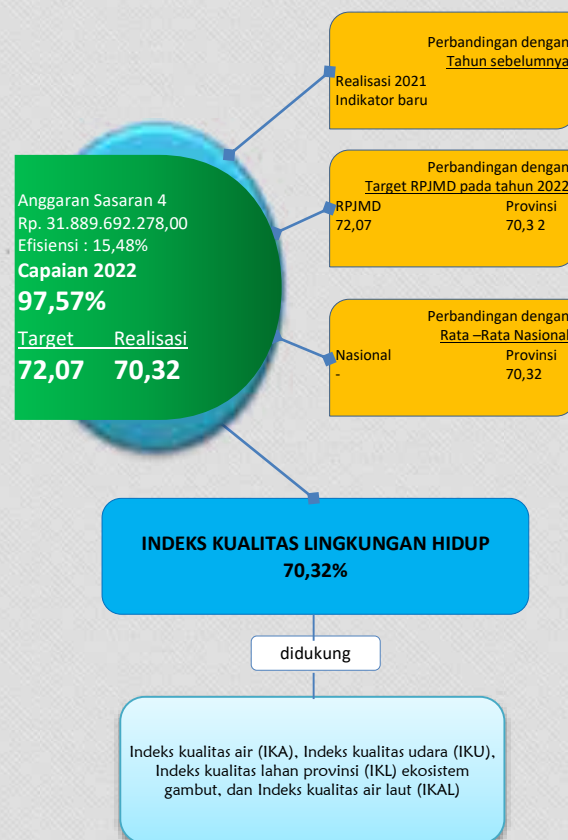
Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



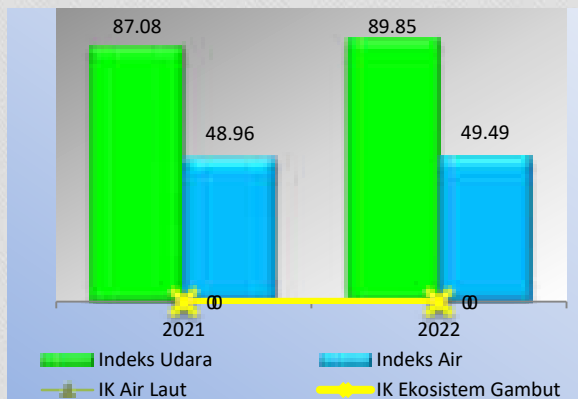
Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator pendukung antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Gambaran capaian kinerja pendukung Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram 3.6. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



SUMBER : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintroduksi sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen

Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji

dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5}.

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} semakin baik.

Hasil penghitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2022 adalah 89,85 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,42 sehingga capaian kinerjanya mencapai 106,43%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 89,85 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$).

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2022. Tahun 2022 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota.

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian

pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Grafik 3.5. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2022 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :



1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan

parameter yang diukur SO_2 dan NO_2 . Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM_{10} , $PM_{2.5}$, SO_2 , NO_2 , O_3 , HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.



Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai

dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran penyawa pencemar.

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2022 dari data hasil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

WILAYAH	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG BERSIFAT BERSIH	PERSENTASAH PENCERAMAN BERSIH	REKORD NILAI TERENDAH	NILAI INDEKS PER WILAYAH
Provinsi	1	100%	10	10,00
Kabupaten	14	100%	10	10,00
Kota	1	100%	10	10,00
Jumlah	16	100%	10	10,00
Indeks Kualitas Air				10,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 3.12. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022

WILAYAH	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG BERSIFAT BERSIH	PERSENTASAH PENCERAMAN BERSIH	REKORD NILAI TERENDAH	NILAI INDEKS PER WILAYAH
Provinsi	1	100%	10	10,00
Kabupaten	4	100%	10	10,00
Kota	1	100%	10	10,00
Jumlah	6	100%	10	10,00
Indeks Kualitas Air				10,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 3.13. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

WILAYAH	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG BERSIFAT BERSIH	PERSENTASAH PENCERAMAN BERSIH	REKORD NILAI TERENDAH	NILAI INDEKS PER WILAYAH
Provinsi	1	100%	10	10,00
Kabupaten	14	100%	10	10,00
Kota	1	100%	10	10,00
Jumlah	16	100%	10	10,00
Indeks Kualitas Air				10,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67.

Hasil perhitungan data indeks kualitas air tahun 2022 untuk 15 titik yang dilakukan sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 49,49.

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2022 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).



Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Grafik 3.6. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

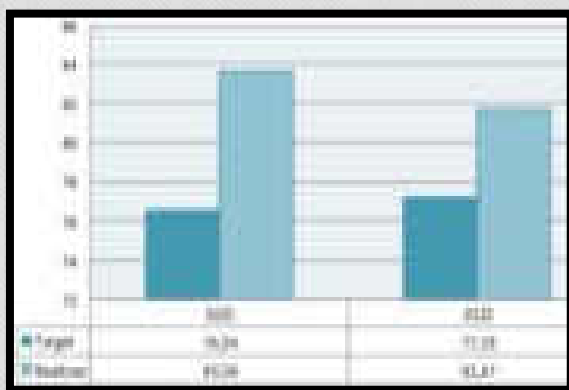
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO,

N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari.

Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67 poin melampaui target tahun ini yakni 77,19 poin atau sebesar 105,80%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 1,91 poin dari 83,58 pada tahun 2021 menjadi 81,67 pada tahun 2022. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD 2021-2026.

Grafik 3.7. Perbandingan Target IKAL PK dengan RPJMD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan sampah laut
2. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah

banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - a. Terdapat drainase buatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
3. Fungsi Budidaya :
 - d. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan
 - e. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 3.14. Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Target	Realisasi
2021	73,39	71,10
2022	73,89	71,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi



Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan Permen LHK No. P.60 / MENLHK/ SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - a. Rencana Pemanfaatan
 - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya.

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; dan tahun ini sebesar 72,42 poin. Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut, meskipun Indeks Kualitas Lahan sama dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH.

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dari evaluasi terhadap 514 kabupaten/kota diperoleh fakta bahwa alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berkisar antara 0,01% - 1,19% dari APBD, sebanyak 168 kabupaten/kota yang SDMnya telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 316 kabupaten/kota telah

melakukan pemantauan kualitas lingkungan, serta 223 kabupaten/kota telah melakukan pengawasan industri.

Sementara itu pada tahun ini, jumlah peserta PROPER mengalami peningkatan dari tahun 2021, yaitu sebanyak 607 perusahaan peserta baru. Peningkatan ini sebesar 23% dari tahun 2021 yaitu meningkat dari 2.593 perusahaan menjadi 3.200 perusahaan pada tahun 2022, yang terdiri dari 1.180 agroindustri, 1.356 manufaktur prasarana jasa, dan 664 pertambangan energi migas.

Setelah sebelumnya menerapkan konsep Life Cycle Analysis, Inovasi Sosial, dan Social Return on Investment (SROI), tahun ini PROPER mengimplementasikan konsep Green Leadership sebagai salah satu kriteria penilaiannya. Konsep Green Leadership dikembangkan sebagai salah satu tolok ukur kemampuan dari seorang pimpinan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan. Pada tahun 2022, 15 CEO telah mempresentasikan konsep Future Fit – Society Jhon Elkinto mewakili 99 kandidat Emas PROPER. Kesempatan sekali dalam satu tahun itu dimanfaatkan sebagian pimpinan perusahaan untuk curhat.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022 menunjukkan hasil antara lain 112,89 juta ton CO₂e penurunan emisi gas rumah kaca, 469,26 gigajoule efisiensi energi, 326,62 juta m³ efisiensi air, daur ulang 10,44 juta ton limbah non B3, daur ulang 25,26 juta ton limbah B3, 33,01 juta ton penurunan beban pencemaran, dan 11,92 juta ton penurunan emisi konvensional.

Tak hanya itu, PROPER 2022 juga menghasilkan 111.006 hektar luasan konservasi keanekaragaman hayati, dan upaya strategis nasional melalui program pemberdayaan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA : PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN



Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui

kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.



Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – 2021), Fase *pre investment* 2021 – 2025) dan Fase *Result Based Payment* (2021 - 2025).

Saat ini proyek dimaksud dalam masa pre Investment untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja

penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.

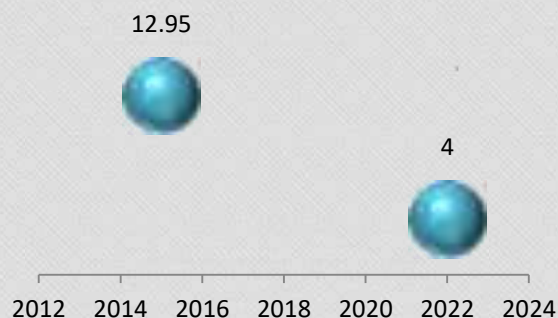
Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (*safeguard*) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen *safeguards* yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. *Safeguard documents* yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF) termasuk dokumen Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan Stakeholder Engagement Plan (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen *Safeguard* dimana dokumen dimaksud

telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2022.

Grafik 3.8. Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain:

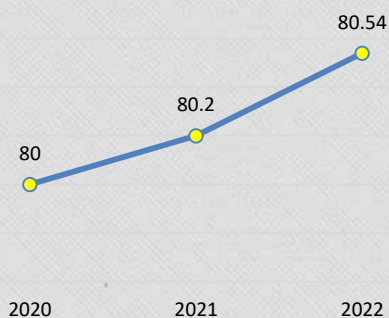
Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Grafik 3.9. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.



Pada tahun 2022, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 15,63%. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal



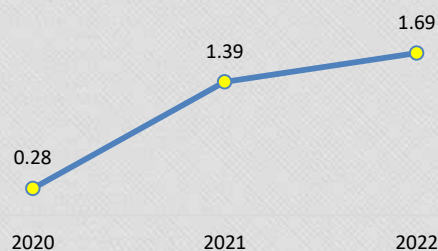
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.11. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 - 2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi.

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 1,69% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- Minimnya anggaran yang disediakan
- Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
- Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNBP PSDH dan Dana Reboisasi.

SASARAN STRATEGIS 5 :

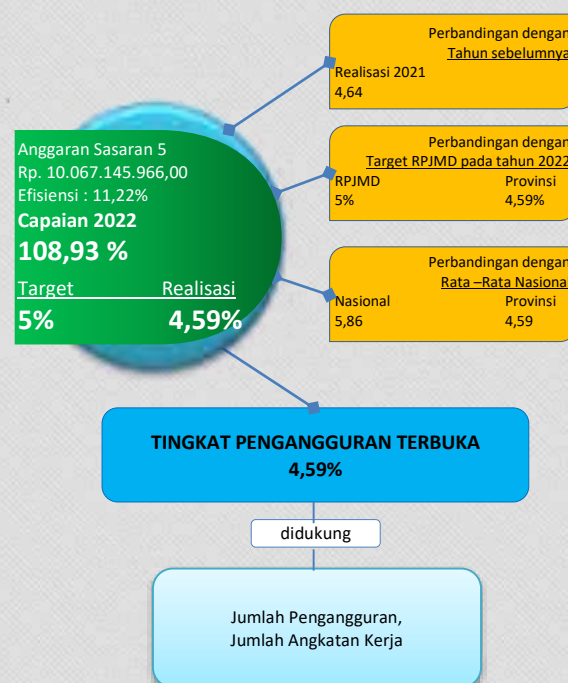
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja :
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2022 sebanyak 1,88 juta orang, bertambah 43,68 ribu orang dibanding Agustus 2021 dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,8 persen atau naik 0,6 poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,59 persen turun 0,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang, meningkat sebanyak 51 ribu orang dari Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan Agustus 2021, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah perdagangan besar (turun 1,1 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor pertanian. ..

Sebanyak 1,08 juta orang (60 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 2,03 persen poin dibanding Agustus 2021. .. Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 2,29 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun 2,09 persen poin.

Sedangkan jika dilihat dalam dua tahun terakhir pekerja setengah pengangguran turun 3,79 persen dan pekerja paruh waktu turun 0,38 persen poin. Terdapat 26,68 ribu orang terdampak covid-19 atau sekitar 0,96 persen penduduk usia kerja. Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (1,59 ribu orang), BAK karena covid-19 (1,71 ribu orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (0,09 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (23,29 ribu orang).

PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,78 juta orang naik sebanyak 37,4 ribu jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,88 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 893,35 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 86,46 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 43,7 ribu

orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 51 ribu sementara pengangguran turun sebanyak 7,3 ribu orang.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 67,8 persen, naik 0,6 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu Negara/wilayah.

Tabel 3.15. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—Agustus 2022

Bentuk Pekerjaan dan Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
	(Juta orang - juta orang - juta orang)		
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.750	2.787	2.790
Angkatan Kerja	1.881	1.884	1.887
Bekerja	1.774	1.779	1.801
Pengangguran	0.107	0.105	0.086
Bukan Angkatan Kerja	0.029	0.099	0.093
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	67,7%	67,3%	67,8%
Laki-laki	86,4%	86,9%	86,9%
Perempuan	48,0%	48,0%	48,0%

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022 TPAK laki-laki sebesar 86,17 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,97 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen poin, sedangkan TPAK perempuan menurun sebesar 0,92 persen poin.

KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

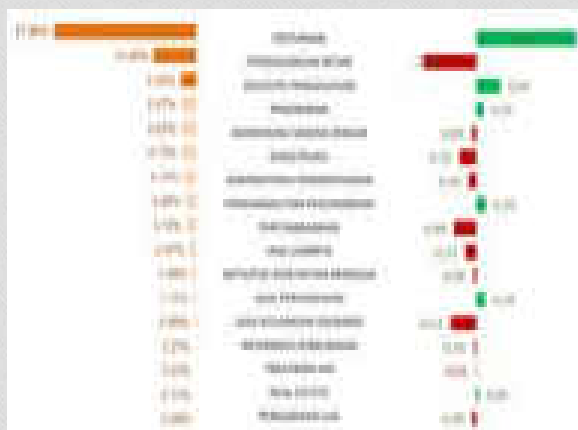
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau

keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 47,96 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 14,49 persen dan Industri Pengolahan sebesar 5,25 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2021.

Gambar 3.4. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022



Dibandingkan Agustus 2021, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (60,57 ribu orang), Industri Pengolahan (11,32 ribu orang), Pengangkutan dan Pergudangan (5,24 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Perdagangan besar turun sebesar 11,9 ribu orang, pertambangan turun sebesar 7,5 ribu orang dan administrasi pemerintahan turun sebesar 5,98 ribu orang.

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2022 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 34,98 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,45 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai serta berusaha dibantu buruh tetap mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,74 persen poin, 1,33 persen poin dan 0,7 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase yang terbesar adalah pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 1,63 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,08 juta orang (60 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 719,44 ribu orang (40 persen). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen poin.

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 4,59 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 46 orang penganggur. Pada Agustus 2022 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022



Tabel 3.16. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020-Agustus 2022

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020-Ags 2021	Perubahan Ags 2021-Ags 2022
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.13	5.09	4.39	-0.04	-0.70
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	4.44	4.32	4.33	-0.12	0.01
- Perempuan	6.34	6.43	5.05	0.09	-1.38
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7.24	7.32	7.21	0.08	-0.11
- Perdesaan	4.39	4.04	3.33	-0.35	-0.71

Pada Agustus 2022, angka TPT laki-laki sebesar 4,33 persen lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,05 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,38 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,21 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,33 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu turun dibandingkan Agustus 2021, masing-masing sebesar 0,11 persen poin dan 0,71 persen poin.

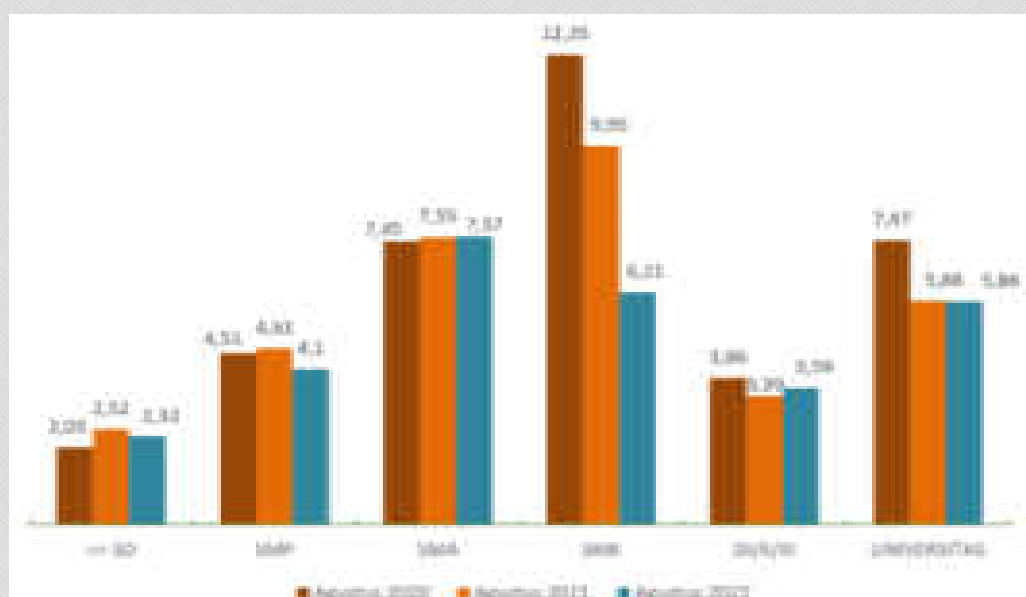
Grafik 3.12. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2022 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2021 dan Agustus 2020. Pada Agustus 2022 TPT dari tamatan sekolah menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,57 persen, sedangkan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 6,11 persen. Sementara itu TPT yang paling rendah adalah pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,32 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2021, angka penurunan TPT terbesar ada pada kategori pendidikan SMK yaitu sebesar 3,84 persen poin.

Grafik 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020—Agustus 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Tabel 3.17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 - Agustus 2022

Kabupaten/Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Penduduk: Ags 2020 – Ags 2021	Penduduk: Ags 2021 – Ags 2022
	(persen)	(persen)	(persen)	(persen perti)	(persen perti)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
Kemari	3,43	3,33	3,48	-0,13	-0,34
Merangin	4,88	4,23	4,49	-0,23	-0,14
Serangan	9,71	8,52	8,23	-0,19	-0,28
Batanghari	4,42	4,24	5,53	-0,14	-0,74
Muaro Jambi	3,43	3,34	3,36	-0,15	-0,23
Tanjung Tiram	3,43	3,34	3,32	-0,15	-0,24
Tanjung Berau	2,18	2,53	2,88	0,20	0,34
Sela	2,95	2,82	3,38	-0,12	0,49
Bungo	5,54	5,84	5,50	-0,07	-0,34
Kota Jambi	10,48	10,44	9,95	-0,17	-0,75
Kota Tanjung Pinang	5,58	5,08	5,49	-0,54	-0,13
Provinsi Jambi	5,12	5,09	4,79	-0,03	-0,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (BPS Provinsi Jambi), Agustus 2020, Agustus 2021, dan Agustus 2022

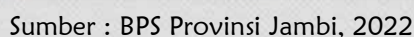
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu : a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja Karena COVID-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.



Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
1. Pengangguran ¹ karena COVID-19	18,79	10,24	5,59	-8,55	-45,51	-4,65	-44,88
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² karena COVID-19	1,62	3,03	1,71	1,41	86,13	-1,32	-55,38
3. Sementara Tidak Bekerja ³ karena COVID-19	12,78	12,54	0,10	-1,20	-9,39	-12,44	-99,24
4. Persekitub Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	217,74	151,54	23,29	-66,40	-30,50	-128,01	-94,61
Total PUK Tindakan COVID-19	252,88	177,35	26,68	-74,95	-29,64	-151,25	-85,01
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.703,85	2.740,18	2.777,63	36,33	1,34	37,45	1,37
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Persentase PUK Tindakan COVID-19 Terhadap PUK	9,25	6,49	0,96	-2,86		-5,53	

Sumber: BPS

¹ Pengangguran karena COVID-19 adalah pengangguran yang terjadi berhari-hari karena COVID-19 sejak Februari 2020

² Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhari-hari karena COVID-19 sejak Februari 2020

³ Sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah persekitub bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022 sebanyak 26,68 ribu orang, jika dibandingkan dengan Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 151,25 ribu atau 85,01 persen. Apabila dilihat dari komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, sebanyak 1,59 ribu orang merupakan pengangguran karena COVID-19; 1,71 ribu orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; 0,1 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan 23,29 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 83,06 %, pada Tahun 2021 capaiannya naik sebesar 119,1% , kemudian pada tahun 2022 menjadi 102,4%, hal tersebut walaupun masih dalam kondisi covid -19, Perusahaan mulai meningkatkan produksi, dan ini berdampak pada formasi lowongan kerja yang ada di Perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.702 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 5.520 orang, untuk tahun 2022 terjadi penurunan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar juga mengalami penurunan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan
Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

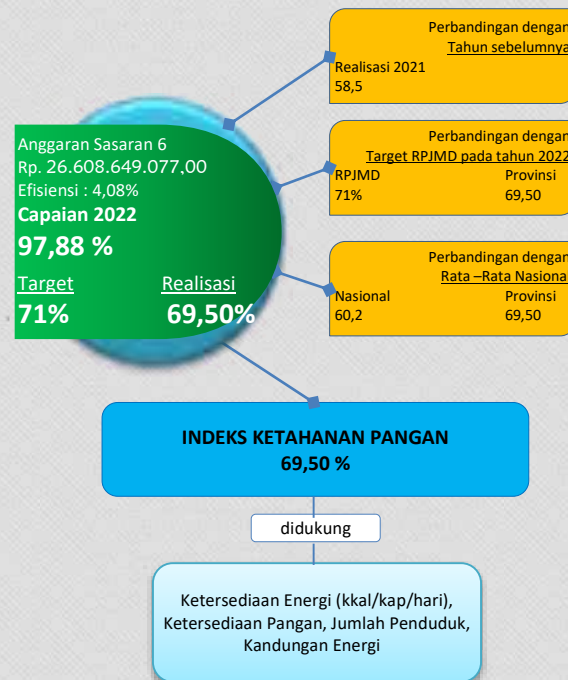
INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.



Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks

Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan



Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 3.7. Skor PPH Tahun 2022

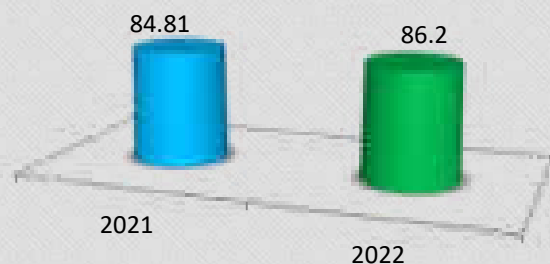
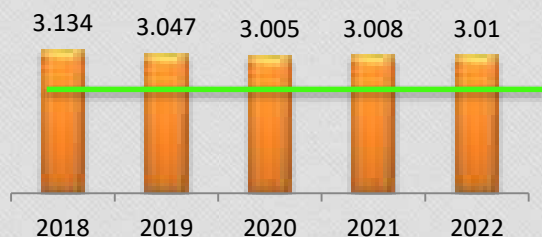
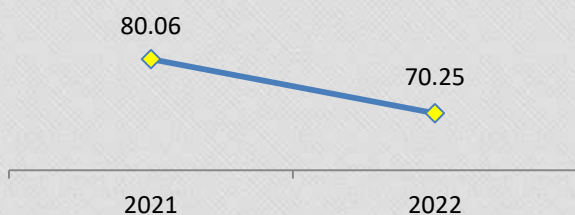


Diagram 3.8. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Grafik 3.13. Ketersediaan Protein



Dari tabel diatas bahwa pada sasaran kinerja Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 87,5, Ketersediaan Energi yakni sebesar 3.010 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 81,5 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di

bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni 88,2 kg/kap/thn, sedangkan realisasi sebesar 88,1 kg/kap/thn, dengan capaian kinerja baik sebesar 100,11 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), ini terbukti penurunan konsumsi beras pada tahun 2022 sebesar 0,1 kg/kap/tahun dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras.


IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 yakni sebesar 2.090,3 kkal/kap/hari.

Berdasarkan data hasil kajian dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2022 yakni sebesar 2.070 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 99,03% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni 61 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 60,7 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 99,51% dan kriteria penilaian sangat baik hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.



Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman pangan.

Upaya meningkatkan komoditas padi dan jagung untuk target produksi padi dan jagung sebesar 1,80 % terealisasi sebesar -3,35 %, Persentase peningkatan produksi padi dengan target 4,68 % terealisasi sebesar -2,97 % dan Persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1,99 % terealisasi sebesar -29,60 % tidak tercapainya target produktivitas dan produksi ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan pada lahan padi dan jagung seluas 3.650,55 Ha.

Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Tercatat pada tahun 2022 terjadi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seluas 5.996,35 Ha. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung.

Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen padi dari 64.412,26 Ha menjadi 63.760,91 Ha dan penurunan luas panen jagung dari 7547,3 Ha menjadi 5584,7 Ha. Adanya Perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS menghasilkan selisih sekitar 100% lebih rendah jika dibandingkan dengan metode SIMTP (Sistim Informasi Manajemen Tanaman Pangan) yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana

produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas.

Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada Tahun 2022 terjadi Refocusing anggaran pada beberapa kegiatan untuk kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).



Capaian kinerja produktivitas dan produksi tanaman pangan mengalami penurunan dari Tahun 2022 dan 2021 baik itu produksi padi dan jagung. Begitu juga dengan produktivitas padi dan jagung. Hal ini terjadi turunnya luas panen padi dan jagung. Hal ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim yang ekstrim, serangan hama dan penyakit serta pada Tahun 2022 telah terjadi refocusing anggaran baik itu anggaran APBD maupun APBN untuk dana penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Refocusing anggaran ini berdampak pada tidak tercapainya beberapa target Renstra yang telah ditetapkan.

Sementara untuk produksi tanaman cabai merah, bawang merah mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut, dimana untuk anggaran kegiatan tanaman cabai merah, bawang merah, tidak mengalami refocusing anggaran.

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2022, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan

menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :

- Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
- Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
- Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
- Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
- Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.

4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.

5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah - buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur-sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain : Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional. Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk import



Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efisiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

f. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya

sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdanei, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.



h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.

- ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
 3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
 4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
 5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui pertambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait

tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.

- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

l. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa.

Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.



Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan

dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2022. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyakan benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2022.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di

Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan



Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyak benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. Meningkatnya Penggunaan / Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyak benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS , jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan

taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering,

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami

dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam

memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan

prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/ packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.
- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala

permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian di daerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT. Pertanian), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan

Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Berdasarkan laporan Economist Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022.

Skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain, seperti ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih lemah. Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin. Lalu, indikator keberlanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

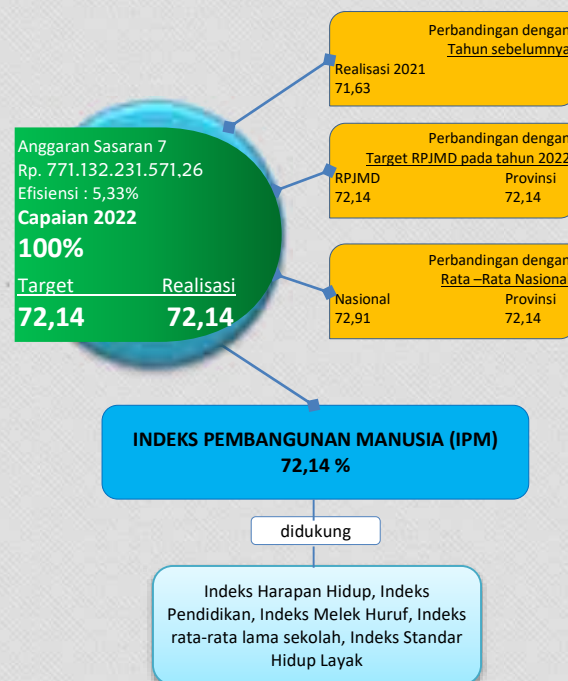
INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022" menyajikan angka IPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan dari komponen pembentuk IPM tahun 2013-2022, yaitu : umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Capaian pembangunan manusia di Jambi selama kurun waktu 2013-2022 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Status IPM Jambi dari tahun 2013–2022 meningkat dari status sedang menjadi status tinggi.

Peningkatan IPM Provinsi Jambi tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan

standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak lebih cepat dari tahun sebelumnya.



Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,50 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,05 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,04 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,60 tahun menjadi 8,68 tahun pada tahun 2022.

Pada 2022, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 283 ribu (2,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2013-2022

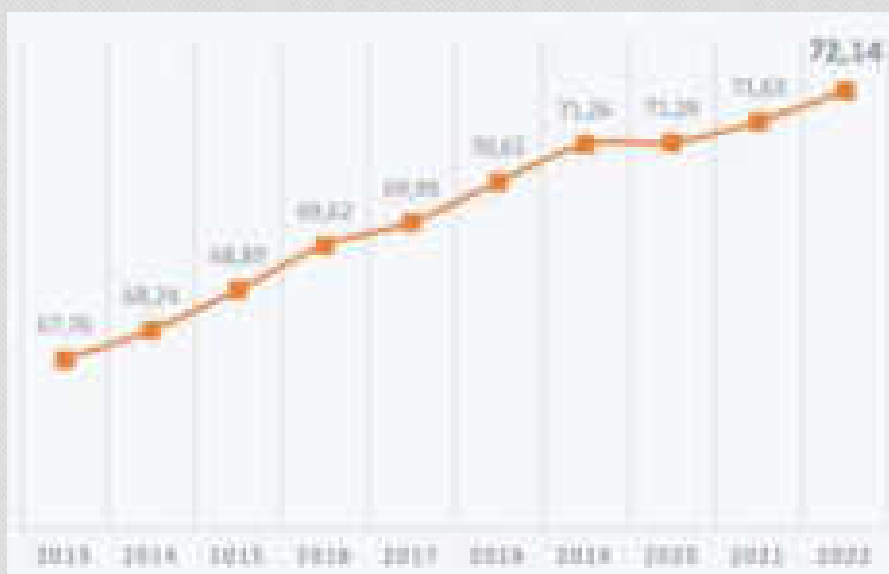
Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Jambi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2013-2022 IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun, dari 67,76 pada tahun 2013 menjadi 72,14 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan IPM pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2021 dan 2022 IPM Provinsi Jambi terus membaik seiring dengan penanganan COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Provinsi Jambi.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2013-2022

Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :



Grafik 3.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

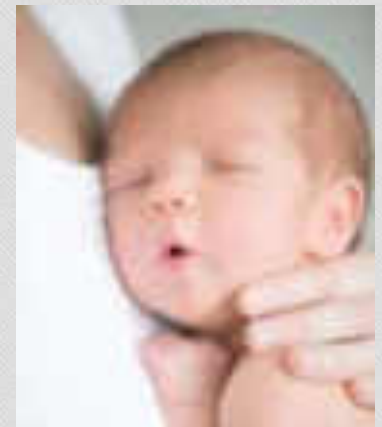
Tabel 3.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jambi Menurut Komponen, 2013-2022

Dimensi/Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Panjang dan Hidup Sehat											
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,35	70,43	70,54	70,71	70,76	70,89	71,06	71,14	71,23	71,50
Pengeluaran											
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,17	12,34	12,57	12,72	12,87	12,99	12,93	12,96	13,04	13,09
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,80	7,92	7,96	8,07	8,25	8,23	8,43	8,39	8,40	8,48
Standar Hidup Layak											
Pengeluaran Rp per Kapita (yang diinflasi)	Rp/1000	9.064	9.141	9.444	9.775	9.889	10.357	10.592	10.792	10.988	11.871
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		67,34	68,34	68,89	69,62	69,99	70,60	71,24	71,29	71,42	72,34

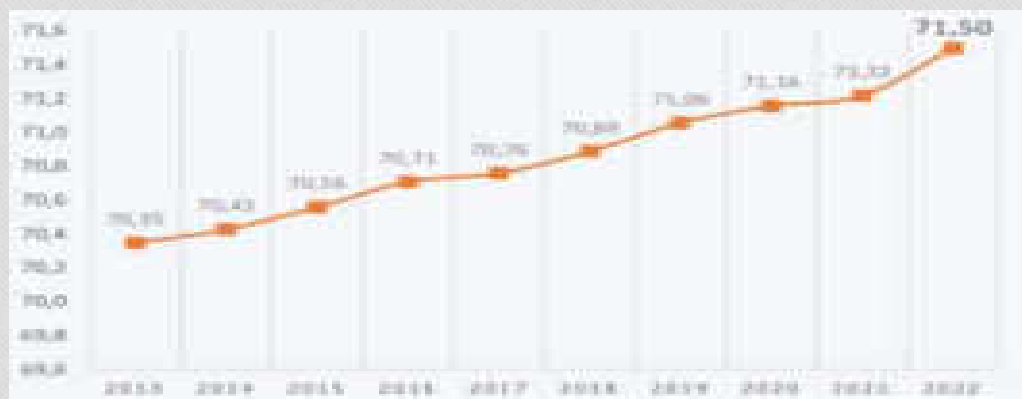
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,15 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada tahun 2013, UHH Provinsi Jambi adalah 70,35 tahun dan pada tahun 2022 telah mencapai 71,50 tahun.



Grafik 3.15. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi, 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)



Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2022 HLS mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode 2013 hingga 2022, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,78 persen per tahun, sementara RLS rata-rata meningkat 1,19 persen per tahun.

Grafik 3.16. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi, 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Standar Hidup Layak



Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Jambi mencapai Rp10.871 ribu per tahun. Capaian ini meningkat 2,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan ekonomi Provinsi Jambi yang terus berlanjut. Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2021 dan 2022 konsisten meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020.

Grafik 3.17. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2013-2022 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten/kota. IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh paling cepat dengan kenaikan 1,32 persen, disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,92 persen), Sarolangun (0,91 persen), dan Muaro Jambi (0,91 persen). Sementara itu IPM Kabupaten Bungo dan Batang Hari tumbuh paling lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya (masing-masing tumbuh 0,57 persen). Tidak terjadi perubahan pada peringkat capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2022, Kabupaten Muaro Jambi mengikuti Kota Jambi, Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Bungo, dan Batang Hari menjadi kabupaten dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dengan peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Muaro Jambi,

Gambar 3.6. IPM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022



jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 7 kabupaten/kota dan yang berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 kabupaten. Sejak tahun 2015, tidak ada lagi kabupaten dengan status pembangunan manusia “rendah” ($\text{IPM} < 60$) setelah status pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penangan konflik Sosial
26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Sertabudaya Politik
27. Program Peningkatan Ketenteramandan Ketertiban Umum

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya

pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan terlaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.



SASARAN STRATEGIS 8 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER



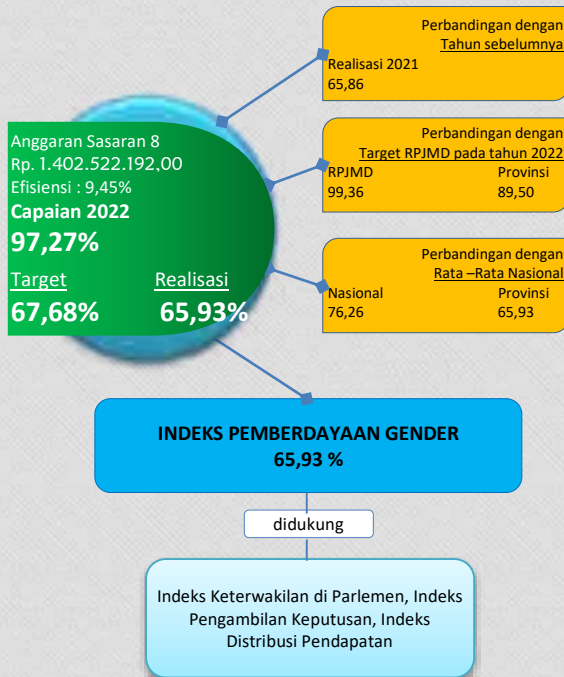
INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

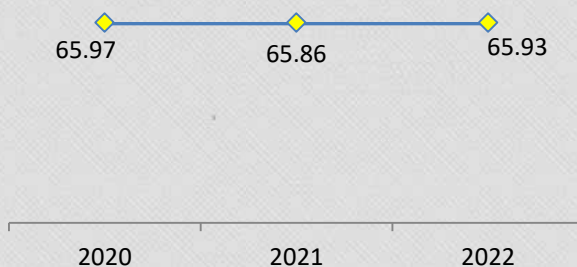
IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknis serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2022 merupakan angka IDG tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.18. Perkembangan IDG



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

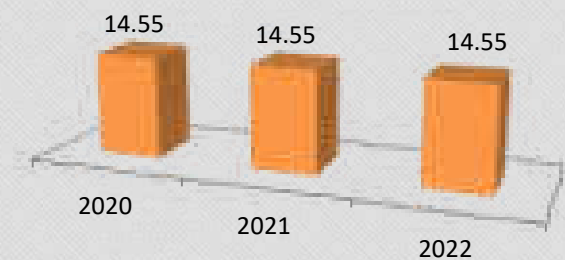
Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota

legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis dalam lembaga legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 14,54% dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Pada pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan di Provinsi Jambi tahun 2019 didapati bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD 2019-2024 belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, namun mengalami peningkatan sebesar 2,9% dari periode pemilu legislatif sebelumnya.

Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi 2019-2024



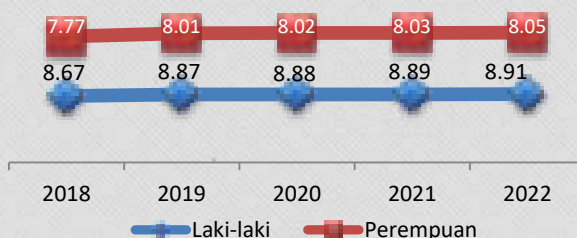
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2022



Keterwakilan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2022, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 3.19. Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan



Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2022

Indeks Distribusi Pendapatan

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan

aspek pemberdayaan perempuan. Terkait dengan ekonomi, analisis gender dapat dikaitkan kedalam berbagai aspek, antara lain pasar kerja, lapangan usaha, sampai kepada layanan keuangan. Dengan menganalisis partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek ini, maka dapat dilihat juga seberapa jauh akses dan peran perempuan didalam perekonomian sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan target SDGs.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Untuk aspek ketenagakerjaan ini salah satu analisisnya adalah dengan melihat aspek pasar tenaga kerja, status pekerjaan, juga upah pekerja perempuan dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.

Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat melakukan

kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Ketimpangan gender dalam ekonomi memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi ketimpangan gender dalam ekonomi antara lain mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, dan rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja. Kemajuan pencapaian kesetaraan gender dalam ekonomi diukur dengan kemajuan sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi antara lain : persentase penduduk yang mengakses komputer, persentase penduduk yang mengakses internet, persentase penduduk yang mendapatkan pelatihan kerja dan persentase penduduk yang mengakses kredit.

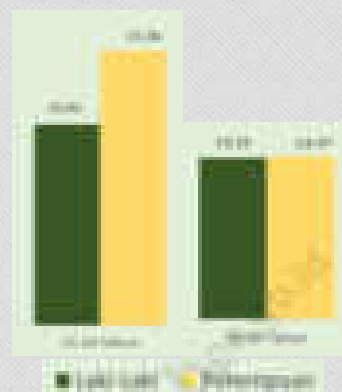
Ketimpangan Gender dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dan telah masuk dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan.



Contoh lain misalnya banyak perempuan yang lebih memilih bekerja di rumah karena dengan bekerja di rumah selain memiliki fleksibilitas jam kerja, mereka juga masih dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tetap membantu menambah income keluarga.

Diagram 3.9. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Diagram 3.10. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Akses terhadap TIK dalam analisis ini dilihat dari akses terhadap komputer dan internet. Diagram diatas menunjukkan perbedaan yang nyata terkait akses perempuan terhadap komputer untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun. Pada kelompok umur yang relatif muda dan usia sekolah (15-24 tahun), justru akses perempuan lebih banyak (27,26%).

Namun sangat berbeda untuk kelompok umur menjelang lansia (15-59 tahun) ; persentasenya relatif sama antara laki-laki dan perempuan, sekitar 14 persen. Ini mungkin berkaitan dengan partisipasi perempuan di dunia pendidikan yang sudah relatif setara dengan laki-laki.

Untuk akses internet, capaiannya dapat dikatakan sangat luar biasa; apalagi untuk kelompok umur 15-24 tahun. Pemanfaatan internet bukan hanya sebagai media komunikasi tapi telah berkembang menjadi sarana untuk belajar, berwiraswasta, mencari kerja, dan berbagai manfaat lainnya. Lebih dari 90 persen penduduk laki-laki usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-harinya; lebih tinggi dari perempuan (89,73%). Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 15-59 tahun; di mana perempuan pada usia produktif hingga lansia yang mengakses internet persentasenya lebih rendah dari laki-laki.

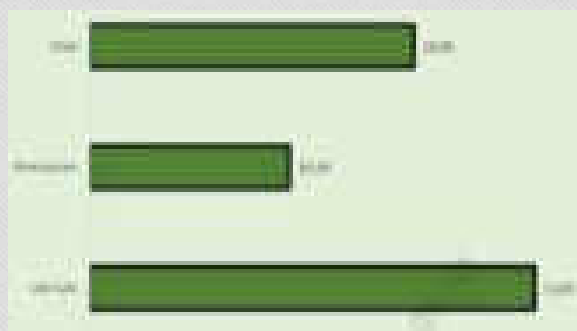
Akses Perempuan Terhadap Pelatihan Kerja

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan khususnya di bidang ekonomi. Misalnya dengan mengadakan pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2021. Pada grafik tersebut terlihat bahwa persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pelatihan kerja hampir sama, namun jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki.



Dengan bekal keterampilan yang didapatkan pada pelatihan kerja ini, akan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan perempuan untuk memperluas pilihan dan peluang kerja serta dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, dengan semakin terbukanya pilihan dan peluang tersebut akan menaikkan taraf hidup perempuan menjadi lebih sejahtera.

Diagram 3.11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Stagnasi Partisipasi Angkatan Kerja dalam Kesenjangan



Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 67,17 yang berarti terdapat sekitar 67-68 orang di antara 100 penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Ditinjau dari jenis kelamin, secara signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan TPAK perempuan sebesar 49,89 sementara TPAK laki-laki sebesar 83,91.

Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan

perempuan. Meskipun peningkatan taraf pendidikan saat ini hampir dapat diperoleh secara merata, pada kenyataannya belum dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu program atau kebijakan sosial yang lebih aktif mendorong peran perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.



Diagram 3.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tergolong rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak perempuan yang sepenuhnya terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Dengan demikian, beberapa penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan.

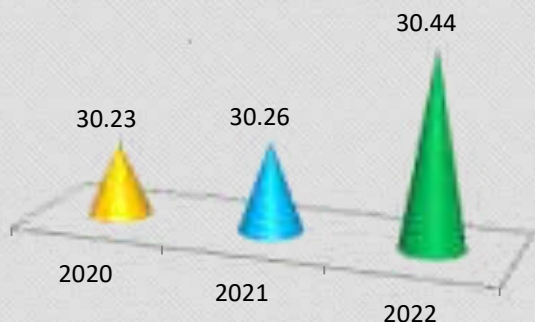
Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Hasil perhitungan menunjukkan, pendapatan per kapita per tahun penduduk Jambi pada tahun 2022 sebesar 10,87 juta rupiah atau sekitar 906 ribu rupiah per bulan.

Berdasarkan data yang ada, besaran pendapatan per kapita per tahun setiap kabupaten/kota berkisar 9,12 sampai dengan 12,60 juta rupiah. Kota Jambi tercatat sebagai daerah yang tertinggi pengeluaran per kapita penduduknya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kota Jambi sebesar 12,60 juta rupiah atau sekitar 1,05 juta rupiah per bulan. Sementara itu pengeluaran per kapita per tahun terendah dirasakan oleh penduduk Kabupaten Muaro Jambi, dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 9,12 juta rupiah atau sekitar 760 ribu rupiah per bulan. Cukup

signifikan perbedaan antara pengeluaran per kapita per tahun antara terendah dengan yang tertinggi, yang tertinggi sekitar 1,4 kali lipat dibandingkan dengan yang terendah.

Diagram 3.13. Perkembangan Indeks Distribusi Pendapatan tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.21. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Rp. 339.326.117.979,74	92,37%	100%	7,63%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 63.148.442.282,42	94,19%	102,38%	5,81%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rp. 562.401.332.580,65	97,72%	105,56%	2,28%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Rp. 31.889.692.278,00	84,52%	109,70%	15,48%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Rp. 10.067.145.966,00	88,78%	108,93%	11,22%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Rp. 26.608.649.077,00	95,92%	97,88%	4,08%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Rp. 771.132.231.571,26	94,67%	100%	5,33%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Rp. 1.402.522.192,00	90,55	97,27%	9,45%
		Rp. 1.805.976.133.926,98	94,97%	103,74%	5,03%

REALISASI ANGGARAN



■ REALISASI ANGGARAN ■ EFISIENSI

Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2022 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.805.976.133.926,98,-. Pada akhir Tahun 2022, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.715.203.647.807,20,- atau sebesar 94,97%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 3, yaitu Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar sebesar 97,72%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebesar 84,52%.

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 sasaran, terdapat 6 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target. Berikut diinformasikan 8 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas” tercapai melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 7,63%.
2. Sasaran “Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan PDRB Hijau” dan Indikator “Tingkat Kemiskinan” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 102,38% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,81%.
3. Sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar” tercapai melalui kinerja “Rasio Konektivitas”, “Akses Terhadap Air Minum Layak”, dan “Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 105,56% dan efisiensi anggaran sebesar 2,28%.
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,70% dan efisiensi anggaran sebesar 15,48%
5. Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” tercapai melalui kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan tingkat capaian sebesar 108,93% dan efisiensi anggaran sebesar 11,22%.
6. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan” dengan kinerja “Indeks Ketahanan Pangan” memperoleh capaian sebesar 97,88% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,08%.
7. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” dengan tingkat capaian sebesar 100% dan memperoleh efisiensi sebesar 5,33%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan” diukur melalui pencapaian kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” dengan perolehan capaian sebesar 97,27% dan tingkat efisiensi sebesar 9,45%.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Gubernur Jambi Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD sebesar **103,74%**. Dari 12 IKU, sebanyak 7 Indikator berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Sebagian sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan yang ditandai oleh 5 target IKU yang belum tercapai. Pertama adalah “Akses terhadap Air Minum Layak”, “Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet”, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, “Indeks Ketahanan Pangan”, dan “Indeks Pemberdayaan Gender”.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.805.976.133.926,98,- terealisasi sebesar Rp. 1.715.203.647.807,20,- dengan efisiensi sebesar 5,03%.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.





LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%	4,6%	101,09%
		Tingkat Kemiskinan	7,90%	7,70 (Sept 2022)	102,59%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9	68,4	126,90%
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08%	78,86%	99,72%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99,36%	89,50	90,07%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07	70,32	97,57%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,283 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	121,83%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	4,59%	108,93%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,00%	69,50	97,88%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	72,14	100%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78	65,93	97,27%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2022
GUBERNUR JAMBI,

D.T.O.

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	4,55%
		Tingkat Kemiskinan (September)	7,90%
3.	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio konektivitas	53,9
		Akses terhadap air minum layak	79,08%
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet	99,36%
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan	3,283 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka (Agustus)	5,00%
6.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,14
8.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,78

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	2.132.246.636.837
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	294.787.673.912
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	967.450.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	51.853.508.555
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	30.670.250
6.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	300.000.000
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	188.337.486.465
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.514.294.780
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	727.815.070
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	134.029.906
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	80.989.855.325
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	4.536.899.993
13.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	4.350.000.000
14.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	750.000.000
15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	3.149.990.300
16.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	5.618.094.789
17.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	78.098.637.170
18.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	46.535.194.537
19.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	410.979.584.069
20.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	4.033.057.889
21.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.478.319.150
22.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	488.593.398
23.	Program Kawasan Permukiman	Rp	18.526.156.882
24.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	27.518.541.590

Program		Anggaran	
25.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	5.339.499.340
26.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	6.345.299.939
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	207.783.500
28.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	2.975.839.684
29.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	175.000.000
30.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	10.958.005.768
31.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	1.748.132.226
32.	Program Penanganan Bencana	Rp	985.196.020
33.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	659.651.098
34.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	72.260.750
35.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	7.218.999.879
36.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	717.641.881
37.	Program Hubungan Industrial	Rp	419.999.895
38.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	582.999.790
39.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	953.055.192
40.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	496.099.600
41.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	191.479.000
42.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	458.515.000
43.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	2.800.718.644
44.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.181.079.398
45.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	2.022.955.600
46.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	560.306.788
47.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	735.000.000
48.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.540.000.030
49.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	140.000.000

Program		Anggaran	
50.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	331.368.213
51.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp	2.238.000.000
52.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	355.111.701
53.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	199.000.000
54.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	598.430.106
55.	Program Pencatatan Sipil	Rp	368.442.256
56.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	776.146.166
57.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	34.095.880
58.	Program Penataan Desa	Rp	93.500.000
59.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	200.000.000
60.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	483.482.000
61.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2.143.037.380
62.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	300.000.000
63.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	120.737.280
64.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	136.023.880
65.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	13.383.528.151
66.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	1.733.842.596
67.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	17.354.183.184
68.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	22.917.595.990
69.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	125.000.000
70.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	300.000.000
71.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	210.000.000

Program		Anggaran	
72.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	2.452.964.000
73.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	704.999.930
74.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	20.499.999.540
75.	Program Pengembangan UMKM	Rp	349.999.620
76.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	214.999.934
77.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	414.999.962
78.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	765.123.650
79.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	787.261.000
80.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	3.608.971.058
81.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	22.342.130.949
82.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	2.700.000.000
83.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	864.652.573
84.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	1.252.907.388
85.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	3.169.749.484
86.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.381.481.500
87.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	325.000.050
88.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	3.999.895.205
89.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.665.193.611
90.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	456.621.293
91.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	1.346.000.000
92.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	1.310.000.000
93.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.974.000.000
94.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	534.000.000

Program		Anggaran	
95.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	1.563.000.000
96.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	2.553.135.190
97.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.934.818.204
98.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	167.591.000
99.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	57.409.800
100.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	25.474.520.216
101.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	8.401.803.413
102.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	751.997.012
103.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	4.659.050.168
104.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	624.999.910
105.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.686.544.484
106.	Program Pengelolaan Hutan	Rp	15.451.957.800
107.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	916.392.361
108.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	6.206.965.680
109.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	79.884.800
110.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	205.736.200
111.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	6.631.038.133
112.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.224.530.315
113.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	69.561.200
114.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	993.472.600
115.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	219.700.000
116.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	2.202.530.363

Program		Anggaran	
117.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	200.300.000
118.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	2.230.852.300
119.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	101.888.960
120.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	75.000.000
121.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	151.999.922
122.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	72.999.750
123.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp	379.999.914
124.	Program Penataan Organisasi	Rp	1.334.881.500
125.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	1.559.724.153
126.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	86.704.087.079
127.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	1.784.844.000
128.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.786.724.650
129.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp	2.400.253.580
130.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	990.021.090
131.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	70.127.168.140
132.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	6.350.144.400
133.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	4.991.175.000
134.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	930.372.875.065
135.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	3.084.088.864
136.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	15.087.213.669
137.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	5.235.479.143
138.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	6.134.145.607
139.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	2.184.358.970
140.	Program Pelayanan Penghubung	Rp	468.277.200

Program		Anggaran	
141.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	8.075.841.698
142.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.280.905.705
143.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	490.000.000
144.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	5.707.737.400
145.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	921.000.000
146.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	536.000.080
147.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	1.989.800.000

Jambi, Januari 2021

GUBERNUR JAMBI,

D.T.O.

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 715 /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 Pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dalam KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 15 Januari 2022

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022- 2026
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
	MISI 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam Komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p>	Kemampuan RB, Biro Organisasi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi			Sumber Data	Keterangan																														
			<table><tr><th>NO</th><th>UNSUR PENILAIAN</th><th>NILAI MAKSIMAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>5,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Peraturan Perundang-undangan</td><td>5,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan dan Penguatan Organisasi</td><td>6,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Penataan Tata Laksana</td><td>5,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>15,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Akuntabilitas</td><td>6,0</td></tr><tr><td>7</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>12,0</td></tr><tr><td>8</td><td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>6,0</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>60</td></tr></table>			NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL	1	Manajemen Perubahan	5,0	2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0	3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,0	4	Penataan Tata Laksana	5,0	5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0	6	Penguatan Akuntabilitas	6,0	7	Penguatan Pengawasan	12,0	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0	JUMLAH		60		
NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL																																			
1	Manajemen Perubahan	5,0																																			
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0																																			
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,0																																			
4	Penataan Tata Laksana	5,0																																			
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0																																			
6	Penguatan Akuntabilitas	6,0																																			
7	Penguatan Pengawasan	12,0																																			
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0																																			
JUMLAH		60																																			

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan															
			<p>Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><th>NO</th><th>Unsur Penilaian</th><th>Nilai Maksimal</th></tr><tr><td>1</td><td>Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi</td><td>20,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</td><td>10,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10,0</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>40,0</td></tr></table> <p>Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survei internal dan eksternal.</p>	NO	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal	1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0	2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,0	3	Kualitas Pelayanan Publik	10,0	JUMLAH		40,0		
NO	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal																		
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0																		
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,0																		
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,0																		
JUMLAH		40,0																		
MISI 2: Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah																				
2	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang	Pertumbuhan PDRB Hijau	$\frac{PDRB\ Hijau_t - PDRB\ Hijau_{t-1}}{PDRB\ Hijau_{t-1}} \times 100\%$ <p>keterangan: <i>PDRB Hijau_t</i> = PDRB Hijau tahun tertentu <i>PDRB Hijau_{t-1}</i> = PDRB Hijau tahun sebelumnya</p>	BPS, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas TPHP, Dinas																

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
	berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		<p>PDRB Hijau didapatkan dari nilai PDRB Konvensional dikurangi nilai deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan hidup.</p> <p>Penilaian deplesi sumber daya alam didapatkan dari pengurangan cadangan sumber daya alam akibat adanya kegiatan ekonomi manusia. Sedangkan penilaian degradasi lingkungan hidup didapatkan dari penurunan kualitas lingkungan yang ditunjukkan oleh berkurangnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>	Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas PUJPR, Dinas LH	
		Tingkat kemiskinan	$P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^p$ <p>keterangan:</p> <p>P_k = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>)</p> <p>z = garis kemiskinan</p> <p>y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$; $y_i < z$)</p> <p>q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = jumlah penduduk</p>	BPS	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
3	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas	<p>Rasio konektivitas Provinsi =</p> $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ <p>a. IK1 (angkutan jalan) =</p> $(\text{jumlah trayek yang dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$ <p>b. IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) =</p> $\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas} \div (\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut})$ <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (angkutan jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu 	Dinas Perhubungan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>IK2 (angkutan sungai, danau, penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot angkutan jalan, atau sungai, danau dan penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 30, bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (bobot angkutan SDP 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot trayek atau lintas:</p> <p>a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8</p> <p>c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0,5</p>		
		Akses terhadap air minum layak	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	BPS, Dinas PU	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>Rumus:</p> $P\ AML = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>JRTML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).</p> <p>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terendah/berpendapatan terendah).</p>		
		Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	<p>Persentase desa/ kelurahan yang memiliki akses internet=</p> $\frac{\text{jumlah desa atau kelurahan yang memiliki akses internet}}{\text{jumlah desa atau kelurahan di Provinsi Jambi}} \times 100\%$		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
4	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH\ Prov = (0,340 \times IKA) + (0,420 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p>Keterangan: IKLH Prov = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi IKA = Indeks Kualitas Air Prov IKU = Indeks Kualitas Udara Prov IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut</p> <p>Dimana: 1. Perhitungan Indeks Kualitas Air:</p> $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{m}{M}\right)_a^2 + \left(\frac{m}{M}\right)_b^2}{2}}$	Kemen. LHK, Dinas LH, Dinas Kehutanan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>Keterangan:</p> <p>IP_i adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij}, dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j.</p> <p>Status baku mutu berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. $0 \leq IP_i \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) b. $1,0 \leq IP_i \leq 5,0$: cemar ringan c. $5,0 \leq IP_i \leq 10,0$: cemar sedang d. $IP_i \geq 10,0$: cemar berat 		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>2. Perhitungan Indeks Kualitas Udara</p> $IKU = 100 - \left(\frac{10}{i_{ku}} \times (i_{ku} - 0,1) \right)$ <p>Keterangan :</p> <p>i_{ku} = Standar kualitas udara berdasarkan EU Directives, dimana $i_{ku} > 1$ berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya</p> <p>3. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan</p> $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times 50/54,3 \right)$ <p>Keterangan:</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> <p>LTL = Lims Tutupan Lahan</p> <p>LW = Luas wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> <p>DKK = dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut</p>		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>4. Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut</p> $WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p>Keterangan:</p> <p>Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i;</p> <p>W_i = bobot parameter kualitas air</p> <p>n = jumlah parameter kualitas air</p>		
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	<p>Metode yang digunakan mengacu pada <i>Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS)</i> untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia. Metode ini mencakup pengumpulan data, analisis data, pengendalian mutu, penjaminan mutu, pemodelan dan pelaporan. Pemodelan emisi GRK dilakukan pada masing-masing sumber karbon berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biomassa hidup di atas permukaan tanah; - biomassa hidup di bawah permukaan tanah; - bahan organik mati (kayu mati, serasah); dan - emisi karbon dari kebakaran. 	Tim teknis Bidang <i>Monitoring and Reporting (MAR)</i> Provinsi Jambi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>Penodelan dilakukan dengan menggunakan model keseimbangan massa, berdasarkan pendekatan berbasis kejadian dimana perubahan stok karbon pada masing-masing sumber karbon dan aliran karbon antar sumber di kuantifikasikan. Dari sumber-sumber karbon di atas, emisi dan serapan GRK tahunan kemudian diperoleh untuk periode waktu tertentu yang diinginkan. Pendekatan ini diterapkan untuk hutan alami, hutan tanaman, perkebunan kelapa sawit dan karet. Penodelan sumber karbon lainnya dan emisi GRK yang dihasilkan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emisi karbon dari tanah mineral, dihitung dengan menggunakan faktor emisi default IPCC dan data aktivitas/kegiatan; - emisi non-CO2 dari kebakaran, dihitung dengan menggunakan rasio N:C default IPCC dan faktor emisi dikalikan dengan karbon yang dilepaskan oleh kebakaran. 		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			<p>Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan. Emisi karbon dan emisi non-CO2 dari tanah organik (gambut) dimodelkan dengan menggunakan metode standar INCAS untuk emisi GRK lahan gambut. Data input yang digunakan untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dihimpun dari output-output data yang dihasilkan dengan menerapkan metode-metode standar INCAS serta dokumen-dokumen lainnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode Standar - Kondisi Awal - Metode Standar - Pertumbuhan Hutan dan Peralihan - Metode Standar - Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan - Metode Standar - Alokasi Spasial Rejim - Metode Standar - emisi GRK Lahan Gambut 		
5	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	BPS	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
6	Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	$KSPE = KTSP / (EP \times 365 \text{ hari}) \times \text{Kand. } e$ <p>Dimana: KSPE = Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari) KTSP = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun) EP = Jumlah Penduduk (jiwa) Kand. e = Kandungan energi</p>	Dinas Ketahanan Pangan	
MESI 3: Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.</p> $IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>dimana :</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $1/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$</p> <p>$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p>	BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
		Indeks Pemberdayaan Gender	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $IDG = \frac{(I_{pw} + I_{pr} + I_{mc-ma})}{3}$ <p>Dimana: I_{pw} = Indeks Keterwakilan di parlemen I_{pr} = Indeks pengambilan keputusan I_{mc-ma} = Indeks distribusi pendapatan</p>	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi